DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI NTT

AYO BANGUN NTT



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



Tahun 2025



#bangamelayanibangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pembangunan sektor urusan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.

Gambaran keberhasilan dan tidak tercapainya misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680713 198903 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan media pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun yang menjadi perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian kategori **Cukup Berhasil**. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,4	1,48	105,71%
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,75	13,55	106,27%
2	Meningkatnya Nilai Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	65	-9,66	-14,86%
RATA–RATA CAPAIAN						**65,71%**

Ketercapaian target kinerja tahun 2025 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi

yang diemban, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dan permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Adapun tingkat pencapaian kinerja yang baik akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang, sedangkan permasalahan yang ada dan muncul akan dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR ISI

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.4 Struktur Organisasi 3

1.5 Sumber Daya Manusia 7

1.6 Dasar Pelaksanaan 10

1.7 Isu Strategis 10

1.8 Sistematika Penulisan 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

2.1 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 13

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur 13

2.1.2 Tujuan dan Sasaran 14

2.2 Rencana Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 16

2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan 16

2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 21

2.2.3 Indikator 21

2.3 Perjanjian Kinerja 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 31

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja 33
3.3 Program yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 49
3.3.1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 49
3.3.2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 56
3.3.3 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 62
3.3.4Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 63
3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Perangkat Daerah 74
3.4.1 Faktor Penghambat 74
3.4.2 Faktor Pendukung 76
3.5 Akuntabilitas Keuangan 77
3.5.1 Anggaran Bersumber Dari APBD 78
3.5.2 Anggaran bersumber dari APBN 81
3.5.3 Pendapatan Tahun 2025 82
3.6 Efisiensi Penggunaan Anggaran 84
3.6.1 Efisiensi APBD Tahun 2025 86
BAB IV PENUTUP 88
4.1 Kesimpulan 88
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi 88

L A M P I R A N

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT 7
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 7
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 8
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 9
Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon 9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 15
Tabel 2.2 Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT 17
Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025 21
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian 22
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan 23
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 27
Tabel 2.7 Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2025 28
Tabel 2.8 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024 29
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 32
Tabel 3.3 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)..... 33
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 34
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 35
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 35
Tabel 3.7 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan) 39
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 40
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya 40
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional..... 40
Tabel 3.11 Nilai Ekspor non migas (US $) Tahun 2023 - 2024..... 44
Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 45
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional..... 45
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 49
Tabel 3.15 Distibusi Kupon Belanja pada Kegiatan Pasar Murah 50
Tabel 3.16 Rekapitulasi Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat..... 52
Tabel 3.17 Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok..... 54
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 56
Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa..... 58
Tabel 3.20 Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi..... 59
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 62
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 62
Tabel 3.23 Rincian Pembentuk NTT Mart di Kabupaten/Kota..... 71
Tabel 3.24 Rincian Fasilitasi NTT Mart di Kabupaten/Kota..... 72

Tabel 3.25 Identifikasi Faktor Teknis yang menjadi penghambat kinerja 74
Tabel 3.26 Identifikasi Faktor Regulasi yang menjadi penghambat kinerja 75
Tabel 3.27 Identifikasi Faktor SDM yang menjadi penghambat kinerja 75
Tabel 3.28 Identifikasi Faktor Eksternal yang menjadi penghambat kinerja 75
Tabel 3.29 Target Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 77
Tabel 3.30 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2025 78
Tabel 3.31 Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2025 78
Tabel 3.32 Realisasi Pendapatan Tahun 2025 82
Tabel 3.33 Keterkaitan Rasio Efisiensi dan Tingkat Efisiensi Anggaran 85
Tabel 3.34 Efisiensi Penggunaan APBD Tahun 2025 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT..... 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjawab tantangan urusan perindustrian dan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini menjadi salah satu pilar untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk mewujudkan *good governance and clean government* yang merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk memberi informasi mengenai capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

a. Tugas Pokok

   Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A. Untuk melaksanankan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terhadap Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana di atas perlu diubah dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

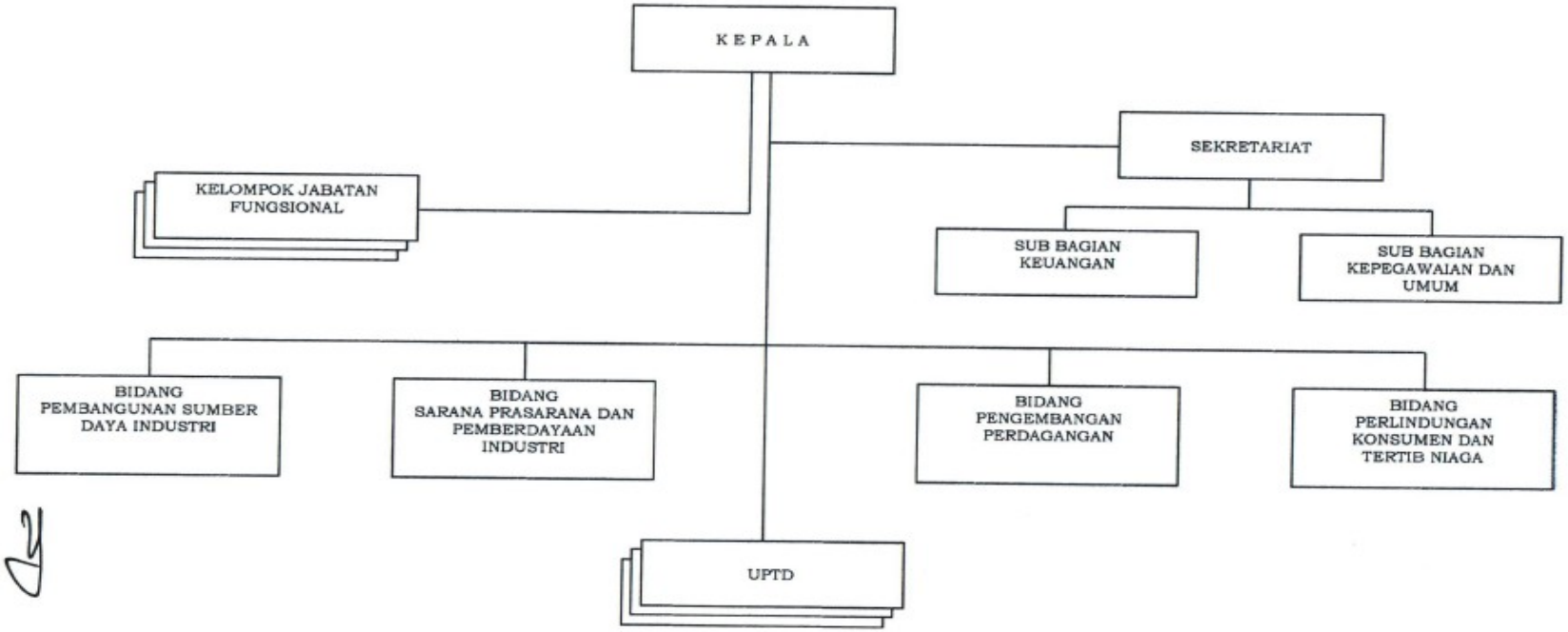
Selain peraturan diatas, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar terbentuknya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Kupang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi Timur sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 90 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Rumusan tugas jabatan struktural yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**

   Memimpin, mengoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan Tugas Pembantuan serta pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

2. **Sekretaris**

   Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi Program, Data dan Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Pelaporan Dinas dan UPTD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris didukung oleh Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan uraian tugas sebagai berikut:

   - Kepala Sub Bagian Keuangan

     Memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi Penatausahaan, Perbendaharaan, Penyusunan Neraca Keuangan dan Aset, serta Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Dinas.
   - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

     Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian dan Umum meliputi Pengusulan Formasi, Pengembangan karir dan Kompetensi, Pembinaan Disiplin, Tatalaksana Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Barang, serta Dokumentasi dan Publikasi.

3. **Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri**

   Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi serta Pengawasan dan Pengendalian.

4. **Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri**

   Memimpin dang mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri meliputi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitasi Industri, Industri hijau dan Standarisasi Industri serta Pengolahan Data dan Informasi Industri.

5. **Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan**

   Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Pengenbangan Perdagangan meliputi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri serta Penggunaaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

6. **Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

   Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga meliputi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga serta Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.

7. **Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)**

   Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang meliputi Ketatausahaan, Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi serta Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PSMB didukung oleh Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi serta Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

   - Kepala Sub Bagian Tata Usaha

     Memimpin dan mengoodinasikan pelaksanaan tugas yang meliputi Ketatausahaan, Pengelola Keuangan, Kepegawaian, Administrasi umum dan Pelaporan UPTD.

   - Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi

     Memimpin dan menyelenggarakan tugas seksi palayanan teknis pengujian dan kalibrasi meliputi Pemberian Layanan Informasi, serta Evaluasi dan Pelaporan.

   - Kepala Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi

     Memimpin dan menyelenggrakan tugas seksi pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi meliputi Pemeliharaan Sistem Mutu serta Evaluasi dan Pelaporan.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum potensi sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pembagian jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	59	30	29
2	CPNS	48	23	25
3	PPPK	48	29	19
4	PPPK Paruh Waktu	6	1	5
5	Tenaga Kontrak	3	2	1
Jumlah		**164**	**85**	**79**

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)		**59**	**30**	**29**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	49	24	25
2	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10	6	4
B. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)		**48**	**23**	**25**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	42	21	21
2	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	6	2	4
C. PPPK		**48**	**29**	**19**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	43	26	17
2	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	5	3	2
D. PPPK Paruh Waktu		**6**	**1**	**5**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	6	1	5
E. Tenaga Kontrak		**3**	**2**	**1**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	3	2	1
Total:		**164**	**85**	**79**

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025

Dari Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sampai dengan Desember tahun 2025 berjumlah 155 orang yang terdiri dari 82 orang laki-laki dan 73 orang perempuan. Sedangkan PPPK Paruh waktu dan tenaga kontrak berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						
		S3	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD
1.	Sekretariat	1	2	24	7	22	-	-
2.	Bidang PSDI	-	3	23	-	9	1	-
3.	Bidang SPPI	-	1	13	1	1	-	-
4.	Bidang PP	-	-	13	-	-	-	-
5.	Bidang PKTN	-	1	9	2	1	-	-
6.	UPTD PSMB	-	1	7	5	7	1	-
J U M L A H		**1**	**8**	**89**	**15**	**40**	**2**	**SD = 0**

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025

Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa ada 98 orang dari total 155 aparatur atau 63,22% ASN pada Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendidikan sarjana (S1 – S3). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur cukup memadai dalam mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini memberikan harapan akan ketersediaan SDM yang lebih dinamis dan responsif terhadap inovasi dalam menangani permasalahan urusan perdagangan dan perindustrian di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan komposisi pegawai pada tabel 1.3 di atas maka jumlah pegawai berdasarkan Golongan sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 10 orang;
- Golongan III sebanyak 93 orang;
- Golongan II sebanyak 10 orang;
- Golongan I tidak ada.

Uraian komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan

Golongan	Sekretariat		Bidang PSDI		Bidang SPPI		Bidang PP		Bidang PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IV b	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3
IV a	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	5
III d	1	5	2	2	1	2	3	2	1	1	-	3	23
III c	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5
III b	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	7
III a	6	7	5	9	6	5	5	1	3	3	2	1	53
II d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
II c	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
II b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	**13**	**17**	**8**	**13**	**9**	**7**	**9**	**4**	**6**	**5**	**6**	**11**	**107**

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024

Dari jumlah tersebut di atas terdapat 11 pejabat struktural, 9 pejabat fungsional dan 135 jabatan administrasi (pelaksana). Komposisi ASN berdasarkan Jabatan/Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon

Jabatan/ Eselon	Sekretariat		Bidang PSDI		Bidang SPPI		Bidang PP		Bidang PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	6
IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Fungsional Tertentu	1	2	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	9
Pelaksana	27	22	17	16	7	5	8	3	5	7	10	8	135
Total	**30**	**25**	**17**	**19**	**9**	**7**	**9**	**4**	**6**	**7**	**10**	**12**	**155**

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta sarana dan prasarana kerja lainnya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja.

1.6 DASAR PELAKSANAAN

Dasar penyusunan dokumen LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Merujuk pada isu-isu strategis yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1) Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
2) Terbatasnya cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT;
3) Belum optimalnya transaksi produk lokal di dalam wilayah NTT;

4) Terbatasnya penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis *Online*;
5) Rendahnya pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri;
6) Terbatasnya data informasi industri provinsi dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
7) Pembangunan sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*) masih belum optimal;
8) Peningkatan kapasitas eskpor dan nasional;
9) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor;
10) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara *real time*;
11) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0);
12) Pengawasan barang dan jasa yang beredar;
13) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang perangkat daerah, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan jumlah pegawai, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2024).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Selanjutnya disajikan akuntabilitas keuangan, cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan yang menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026. Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Renstra merupakan pendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2024-2026 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.1 Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global;
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;

6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Untuk mendukung Visi dan Misi di atas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan Ekspor
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiataan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung tujuan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keadilan social dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yakni tumbuhnya ekonomi daerah. Strategi pelaksanaan program/kegiatan diarahkan sesuai dengan strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas industri pengolahan, peningkatan pemasaran dan ekspor komoditi olahan, pemberian dukungan dan fasilitasi, pemantapan infrastruktur perdagangan, peningkatan nilai tambah (*value added*) produk, perbaikan sistem usaha dan investasi, dan pemantapan NTT sebagai wilayah ekonomi yang terintegrasi (masyarakat ekonomi).

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026
1	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan Industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,21	1,3	1,4	1,5
2	Meningkatkan jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	100	55	65	75
		Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok bahan pokok	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	2,55	3	3	8,50
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	-	100	100	100
			Peningkatan layanan pengujian dan kalibrasi (%)	55,56	60	70	75
4	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)	90,12	95	95	95
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)	63,54	95	95	95
			Tercapainya penyusunan capaian ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)	68,86	95	95	95

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan perdagangan NTT selama periode 2024-2026.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah serta pemerataan pembangunan Industri di wilayah NTT	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	1) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	1) Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Wirausaha Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pembina Industri 2) Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam 3) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA
		2) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi	1) Pemanfaatan teknologi industri dalam pengembangan budaya industri dan/atau kearifan lokal 2) Fasilitasi masyarakat untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk 3) Fasilitasi ketersediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi
		4) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Industri	1) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait perijinan di bidang industri 2) Pemantauan, pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran perijinan industri, terutama terhadap IUI, IUKI dan IPKI
		3) Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah dalam Rantai Nilai (*Value Chain*) dan Rantai Pasokan (*Supply Chain*) yang Terintegrasi dengan Industri Besar	1) Peningkatan pertumbuhan industri di daerah tujuan Pariwisata *Estate* dan industri yang berbasis komoditas unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2) Penguatan kapasitas IKM melalui peningkatan kemampuan sentra, UPT, Fungsional Penyuluh dan Konsultan IKM; serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Litbang, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi terkait 3) Bimtek, fasilitasi bantuan, akses pembiayaan, promosi dan pengembangan produk unggulan daerah 4) Fasilitasi pola kemitraan/ kerjasama antara industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5) Memfasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standardisasi Industri	1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri 2) Fasilitasi Pembangunan Sentra IKM, minimal 1 (satu) Sentra di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau Sentra Industri Kreatif 3) Penyusunan rancangan regulasi teknis dan standardisasi industri dalam pengembangan produk unggulan
		6) Menyediakan Data dan Informasi Industri	1) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT 2) Penyediaan data dan informasi industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem Informasi
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	1. Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok barang pokok 2. Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	1) Meningkatkan kontribusi perdagangan besar, kecil serta sektor real dalam peningkatan PDRB NTT	1) Peningkatan pertumbuhan perdagangan di daerah tujuan Pariwisata estate 2) Fasilitasi Peningkatan SDM , Pembiayaan dan bantuan peralatan di daerah tujuan pariwisata estate
		2) Meningkatkan fasilitas dan pemasaran produk dalam Negeri	1) Penguatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan dan peningkatan sarana perdagangan untuk kelancaran pemasaran produk dalam Negeri
		3) Meningkatkan distribusi produk lokal Unggulan Daerah	1) Peningkatan arus distribusi untuk pemerataan barang dan jasa di semua wilayah
		4) Meningkatkan akses pasar dalam Negeri	1) Penguatan jejaring pemasaran dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Unggulan Daerah
		5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dalam negeri	1) Peningkatan sistem informasi perdagangan dalam negeri
		6) Meningkatkan pengendalian harga dan distribusi barang jasa	1) Peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka pengendalian harga dan distribusi Bapok serta Banting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7) Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas melalui hilirisasi	1) Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri melalui Skema Kerjasama Selatan Selatan
		8) Meningkatkan Kualitas Produk ekspor melalui Fasilitasi stadarisasi produk ekspor	1) Peningkatan mutu produk ekspor sesuai standar yang berlaku 2) Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan kelembagaan ekspor
		9) Meningkatkan aktivitas ekspor dan pengendalian impor melalui fasilitasi perdagangan	1) Pengendalian impor bahan baku dan barang modal;
		10) Menjamin aktivitas perdagangan luar negeri sesuai Kebijakan yang berlaku	1) Koordinasi dan sinergi antar stakeholder dan pelaku usaha dalam penerapan kebijakaan perdagangan luar negeri dalam aktivitas perdagangan luar negeri
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	1) Mengembangkan standardisasi, mutu produk, regulasi pro konsumen	1) Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang dan pengawasan barang dan jasa yang beredar
		2) Pemberdayaan konsumen	2) Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap K3l dalam produksi dan konsumsi produk
		3) Penguatan kapasitas kelembagaan laboratorium pengujian mutu dan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota	3) Pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	1) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	1) Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar	1) Penyedian sarana dan prasarana sesuai tuntutan kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan	1) Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan	1) Penyediaan Sistem informasi publik dan pelaporan secara *online*
	3) Meningkatnya kompetensi SDM	1) Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia	1) Peningkatan profesionalisme aparatur

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026

2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk menjalankan program kegiatan tahun 2025 , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat anggaran dana APBN dan APBD. Rincian besarnya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025

NO.	SUMBER DANA/PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025 (Rp)
A.	**DANA APBN**	0,-
	Jumlah	**0,-**
B.	**DANA APBD**	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.090.670.776,-
	2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.036.370.000,-
	3 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	660.102.892,-
	4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.882.900,-
	5 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.118.459.047,-
	Jumlah	**32.936.485.615,-**

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025 didukung dana APBD sebesar Rp32.936.485.615,- (Tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima belas empat rupiah).

2.2.3 Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandat (*core business*) yang diemban.

1. Urusan Perindustrian

Sektor industri mendukung pencapaian visi dan misi dari pencapaian kinerja pada aspek daya saing daerah dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB NTT.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) program urusan perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,21	1,3	1,4	1,5

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

2. Urusan Perdagangan

Ada 2 (dua) sasaran dalam pencapaian Indikator makro Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan yaitu Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan dan Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional masing-masing sasaran terdapat 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka IKU urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2024	2025	2026
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,05	12,5	12,75	13
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	23,56	55	65	75

Sumber Data : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama. Namun dalam perjalananan Tahun 2025 terjadi perubahan/revisi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, serta karena adanya *redesign* (perubahan) anggaran.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2025
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,4
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,75
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor	1. Persentase peningkatan nilai ekspor	65

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi		Target
1.	**APBD**			
a.	**Belanja (Program)**	**Rp.**	**32.936.485.615,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	11.090.670.776,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	2.036.370.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	660.102.892,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	30.882.900,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	19.118.459.047,-	Realisasi minimal 85 %
b.	**Pendapatan**	**Rp.**	**169.165.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	**Rp.**	**33.105.650.615,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**			
a.	**Program Dekonsentrasi**			
	1.			
b.	**Program Tugas Pembantuan**			
	1.			
	Jumlah Tugas Pembantuan			

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL rekomendasi tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

2. TL rekomendasi dibawah tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%.

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-upload) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Tabel 2.6

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,40	1,4	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun n / Total PDRB Tahun n x 100%
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,80	12,75	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun n / Total PDRB Tahun n x 100%
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	6,09	65	(Nilai Ekspor Tahun n - Nilai Ekspor Tahun (n – 1)) / Nilai Ekspor Tahun (n – 1) x 100%

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025

Sedangkan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2025

A.	APBD	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.090.670.776,-
2.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.036.370.000,-
3.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	660.102.892,-
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.882.900,-
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.118.459.047,-
	Jumlah	**32.936.485.615,-**
B.	**APBN**	**PAGU ANGGARAN (Rp)**
Dekonsentrasi:		**0,-**
Tugas Pembantuan:		**0,-**
	Jumlah	**0,-**

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis, dilaksanakan program kegiatan yang berkontribusi dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran. Program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Aktivitas Pendukung
1.	**Terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah**	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase nilai transaksi produk yang dipasarkan**	**80**	
		a. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			1. Pelatihan Pemasaran *Online* 2. Dekranasda
		- Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM Yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, *Market Place*, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	
2.	**Terjaganya kestabilan harga barang dan ketersediaan stok bahan pokok**	**Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun**	**3 - 5**	
		a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			1. Pasar Murah Bersubsidi
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	**1**	
		b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaann Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yangTerintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			1. Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional
		- Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Aktivitas Pendukung
3.	**Meningkatnya pemberdayaan konsumen, Standardisasi mutu produk dan pengawasan barang dan jasa**	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen**	**63**	
		b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluarsa
		- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuaiParameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta KegiatanPerdagangan yang Diawasi	**1**	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	**Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian**	**25**	
		a. Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota			1. Layanan Kalibrasi
		- Pengembangan layanan kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	50	
4.	**Meningkatnya kualitas dan Keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase pertumbuhan industri pengolahan**	**1,75**	
		a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1. Kampanye Gerakan Beli NTT 2. Pelatihan Pengolahan Produk dan Fasilitas HKI Merek 3. Temu Bisnis 4. Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek 5. Hibah Dekranasda
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1. Fasilitasi Sertifikasi Halal 2. Festival IKM/UMKM 3. Malam IKM/UMKM 4. Dapur Flobamorata 5. NTT Mart 6. Rapat Koordinasi Tim P3DN

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

BAB III

AKUTANBILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun

	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
Adapun penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut:	**X ≥ 85 %**	**Sangat Berhasil**
	75% ≤ X < 85%	**Berhasil**
	55% ≤ X < 75%>	**Cukup Berhasil**
	X < 55 %	**Belum Berhasil**

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Target × 100%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,40	1,4	1,48	105,71%
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,80	12,75	13,55	106,27%
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	6,09	65	-9,66	-14,86%
RATA–RATA CAPAIAN							**65,71%**

Dari rata-rata capaian kinerja diatas Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai **65,71%** yang artinya masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 5 Program/Kegiatan yang bersumber pada APBD. Dalam pelaksanaannya, anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami *redesign* (perubahan), tidak terkecuali anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tabel 3.2 di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB
INDIKATOR KINERJA 1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
INDIKATOR KINERJA 2	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
		2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.405,23
2	Pertambangan dan Penggalian	1.422,84
3	**Industri Pengolahan**	**2.197,59**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	136,14

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
		2025
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	80,25
6	Konstruksi	14.206,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.109,49
8	Transportasi dan Pergudangan	7.436,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.081,37
10	Informasi dan Komunikasi	9.815,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.291,57
12	Real Estate	3.811,91
13	Jasa Perusahaan	221,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.208,54
15	Jasa Pendidikan	13.447,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.103,51
17	Jasa lainnya	2.398,86
	Total PDRB :	**148.373,38**

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2025

Sehingga dari tabel di atas persentase kontibusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2025 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun n}}{\text{Total PDRB Tahun n}} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{2.197,59}{148.373,38} \times 100\% = 1,48\ \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,4	1,48	105,71

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.197,59 miliar atau 1,48 persen dari total PDRB sebesar Rp148.373,38 miliar. Capaian tersebut lebih tinggi 0,08 persen dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 1,40 persen pada Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Utama ke-1. Dengan demikian, realisasi kinerja telah melampaui target sehingga persentase capaian kinerja dihitung sebesar 105,71 persen.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	**1,4**	1,40	**1,48**

Berdasarkan Tabel 3.5, persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,48 persen, meningkat 0,08 persen dibandingkan realisasi tahun 2024.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB **) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas*	1,48	17,28	➢ Provinsi NTT (ADHB): - Total PDRB : Rp2.197,59Miliar - PDRB Indutri Pengolahan : Rp148.373,38 Miliar ➢ Nasional (ADHB): - Total PDB : Rp23.821.103,60 Miliar - PDB Industri Pengolahan Non Migas : Rp4.117.334,50 Miliar
	- Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Miliar) **) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas*	2.197,59	4.117.334,50	Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi NTT tahun 2025 mencapai Rp2.197,59 Miliar memberikan kontribusi sebesar **0,05%** terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan non migas nasional yang mencapai nilai sebesar Rp4.117.334,50Miliar
	- Pertumbuhan Nilai PDRB sub sektor industri pengolahan **) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas*	10,75%	5,15%	PDB Nasional (ADHK): Rp2.519.760,70 Miliar (2025) Rp2.396.427,70 Miliar (2024) PDRB Provinsi NTT (ADHK): Rp1.114,03 Miliar (2025) Rp1.005,91 Miliar (2024)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2024-2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.6, persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi NTT tahun 2025 tercatat sebesar 1,48 persen, masih jauh di bawah capaian nasional sebesar 17,28 persen. Nilai PDRB industri pengolahan Provinsi NTT atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp2.197,59 miliar dari total PDRB sebesar Rp148.373,38 miliar, sedangkan secara nasional PDB industri pengolahan non migas mencapai Rp4.117.334,50 miliar dari total PDB nasional sebesar Rp23.821.103,60 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan Provinsi NTT terhadap perekonomian nasional masih relatif rendah.

Namun demikian, dari sisi pertumbuhan ekonomi riil (ADHK), kinerja sub sektor industri pengolahan Provinsi NTT menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan nasional. Pada tahun 2025, pertumbuhan PDRB industri pengolahan Provinsi NTT mencapai 10,75 persen dengan nilai PDRB ADHK mengalami peningkatan sebesar Rp108,12 miliar dari tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi serta potensi penguatan sektor industri pengolahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang perlu terus didorong melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan pengembangan IKM.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor pendukung, faktor penghambat, serta langkah solusi yang dapat dilakukan.

- **Faktor Pendukung**

  Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT antara lain:

  1. Ketersediaan Bahan Baku Lokal

     NTT memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat menjadi bahan baku utama bagi industri pengolahan. Ketersediaan bahan baku ini menjadi modal penting dalam meningkatkan aktivitas produksi.

  2. Penguatan IKM dan UMKM

     Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap IKM/UMKM melalui pelatihan, fasilitasi perizinan, sertifikasi produk, serta promosi, sehingga mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk industri pengolahan.

3. Dukungan kebijakan pemerintah daerah

   Adanya program pengembangan industri berbasis potensi lokal, hilirisasi produk unggulan, serta fasilitasi kemitraan usaha turut mendorong tumbuhnya aktivitas industri pengolahan.

4. Peningkatan akses pasar

   Pemanfaatan platform digital, keikutsertaan dalam pameran, serta kegiatan *business matching* membantu memperluas jangkauan pemasaran produk industri pengolahan NTT, baik di pasar domestik maupun ekspor.

- **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor yang menghambat peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT antara lain:

1. Skala produksi dan teknologi yang masih terbatas

   Sebagian besar industri pengolahan masih berskala kecil dengan pemanfaatan teknologi sederhana, sehingga kapasitas produksi dan efisiensi belum optimal.

2. Kualitas SDM industri yang belum merata

   Keterbatasan keterampilan teknis dan manajerial pelaku usaha menjadi kendala dalam pengembangan produk bernilai tambah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk.

3. Biaya logistik relatif tinggi

   Kondisi geografis kepulauan menyebabkan tingginya biaya distribusi, yang berdampak pada daya saing produk industri pengolahan.

4. Hilirisasi produk belum optimal

   Sebagian komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah yang diperoleh daerah masih rendah.

5. Akses pembiayaan yang terbatas

   Pelaku IKM/UMKM masih menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha untuk pengembangan kapasitas produksi.

- **Solusi**

Sebagai upaya yang dapat dilakukan guna mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan di daerah maka langkah-langkah yang menjadi fokus penguatan disampaikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM dan Teknologi

   Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi IKM.

2. Peningkatan Mutu dan Standardisasi Produk

   Melakukan pendampingan sertifikasi, pengembangan desain produk, dan perbaikan kemasan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

3. Penguatan Jejaring Kemitraan

   Menjalin kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha besar, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperluar jaringan usaha.

4. Peningkatan Branding dan Akses Pasar Produk Lokal

   Mengembangkan identitas produk daerah melalui promosi terpadu serta partisipasi pada berbagai pameran tingkat daerah dan nasional guna meningkatkan visibilitas dan pengenalan produk industri lokal

1.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
		2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.405,23
2	Pertambangan dan Penggalian	1.422,84
3	Industri Pengolahan	2.197,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	136,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	80,25
6	Konstruksi	14.206,21
7	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**20.109,49**
8	Transportasi dan Pergudangan	7.436,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.081,37
10	Informasi dan Komunikasi	9.815,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.291,57
12	Real Estate	3.811,91
13	Jasa Perusahaan	221,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.208,54
15	Jasa Pendidikan	13.447,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.103,51
17	Jasa lainnya	2.398,86
	Total PDRB	**148.373,38**

Sumber Data : PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2025

Sehingga dari tabel di atas persentase kontibusi perdagangan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2025 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun n}}{\text{Total PDRB Tahun n}} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{20.109,49}{148.373,38} \quad X\ 100\% \quad = \quad 13,55\ \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,75	13,55	106,27

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp20.109,49 miliar atau 13,55 persen dari total PDRB ADHB sebesar Rp148.373,38 miliar. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 12,75 persen, sehingga realisasi lebih tinggi 0,80 persen sebagaimana tercantum pada Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Kedua. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 106,27 persen.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	**12,75**	12,80	**13,55**

Berdasarkan Tabel 3.9, persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 realisasi kontribusi tercatat sebesar 12,80 persen, meningkat menjadi 13,55 persen pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sebesar 0,75 persen. Peningkatan kontribusi ini mencerminkan membaiknya aktivitas perdagangan serta peran sektor perdagangan yang semakin signifikan dalam mendukung perekonomian daerah.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB **) Nas.: PDB sektor perdagangan*	13,55	13,17	➢ Provinsi NTT (ADHB): - Total PDRB : Rp148.373,38 Miliar - PDRB Perdagangan : Rp20.109,49 Miliar ➢ Nasional (ADHB): - Total PDB : Rp23.821.103,60 Miliar - PDB Perdagangan : - Rp3.136.599,50 Miliar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Keterangan
		NTT	Nasional	
	- Nilai PDRB Perdagangan (Rp. Miliar) **) Nas.: PDB sektor perdagangan*	20.109,49	3.136.599,50	Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Provinsi NTT tahun 2025 mencapai Rp20.109,49 Miliar memberikan kontribusi sebesar **0,64%** terhadap PDB ADHB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor nasional yang mencapai nilai sebesar Rp3.136.599,50 Miliar
	- Pertumbuhan Nilai PDRB sub sektor perdagangan **) Nas.: PDB sektor perdagangan*	12,43%	5,49%	PDB Nasional (ADHK): Rp1.775.024,90 Miliar (2025) Rp1.682.612,10 Miliar (2024) PDRB Provinsi NTT (ADHK): Rp11.100,14 Miliar (2025) Rp9.872,60 Miliar (2024)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2024-2025 (data diolah)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi NTT tahun 2025 tercatat sebesar 13,55 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 13,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran sektor perdagangan Provinsi NTT dalam perekonomian daerah relatif sejalan dengan rata-rata nasional.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi riil (ADHK), kinerja sub sektor perdagangan Provinsi NTT menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan nasional. Pada tahun 2025, pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan Provinsi NTT mencapai 12,43 persen, dengan nilai PDRB ADHK meningkat sebesar Rp1.227,54 miliar dibandingkan tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan meningkatnya aktivitas perdagangan di Provinsi NTT, yang didukung oleh perbaikan distribusi barang, stabilitas harga, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor pendukung, faktor penghambat, serta langkah solusi yang dapat dilakukan.

- **Faktor Pendukung**

  Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kontribusi sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT antara lain:

1. Monitoring dan Pengendalian Harga serta Stok Barang Kebutuhan Pokok

   Kegiatan pemantauan dan pengendalian harga dan stok membantu menjaga stabilitas ketersediaan komoditas penting, sehingga perdagangan berjalan lancar tanpa gangguan.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Barang Beredar

   Pengendalian terhadap barang beredar dan jasa memastikan perdagangan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

3. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Lembaga Terkait

   Sinergi lintas sektor memperkuat rantai pasok barang dan meningkatkan efisiensi distribusi antarwilayah di NTT.

4. Penguatan Pemasaran, Promosi, dan Standardisasi Produk

   Memperluas jangkauan pasar melalui promosi digital dan pameran untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap PDRB.

5. Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing

   Program penguatan kapasitas pelaku usaha dalam penggunaan media sosial, fotografi produk, dan manajemen toko online menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan.

- **Faktor Penghambat**

  Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang muncul dalam proses distribusi, pemasaran, dan aktivitas pelaku usaha. Untuk memahami kondisi yang membatasi kinerjanya, berikut disampaikan faktor-faktor penghambat yang memengaruhi perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Akses Internet dan Teknologi yang Belum Merata

   Pemasaran digital dan pemanfaatan marketplace sering terhambat oleh kualitas jaringan internet yang belum optimal di sejumlah daerah.

2. Kapasitas Pelaku Usaha yang Masih Rendah

   Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro/kecil, sehingga kapasitas usaha dan akses pembiayaan terbatas, serta banyak Pelaku IKM/UMKM yang belum memiliki kemampuan manajemen usaha, pemasaran digital, maupun pemenuhan standar mutu produk yang memadai untuk bersaing.

3. Pengawasan Barang Beredar yang Belum Merata

   Penyebaran produk yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak memiliki legalitas dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan mengganggu iklim perdagangan.

4. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis

   Perubahan harga bahan pokok atau komoditas unggulan dapat mengganggu kelancaran perdagangan dan berdampak pada nilai kontribusi sektor perdagangan.

- **Solusi**

  Memperhatikan berbagai kendala yang memengaruhi perkembangan sektor perdagangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat kinerja dan mendorong peningkatan kontribusinya terhadap PDRB. Berikut sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penguatan sektor perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha

   Memberikan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas manajerial dan pemasaran bagi pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen

   Melaksanakan pengawasan rutin terhadap barang beredar untuk memastikan mutu, keamanan, dan kepatuhan standar, sehingga menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan terpercaya.

3. Monitoring dan Pengendalian Harga serta Stok Kebutuhan Pokok

   Melakukan pemantauan harga secara berkala, mengontrol ketersediaan komoditas strategis, serta koordinasi dengan pelaku distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan.

4. Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal, Termasuk Pemasaran Digital

   Mendorong promosi produk daerah melalui pameran, katalog digital, pelatihan pemasaran online, *onboarding marketplace*, serta kampanye bangga produk lokal.

2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Nilai Ekspor
INDIKATOR KINERJA 1	Persentase peningkatan nilai ekspor

Untuk meningkatkan nilai ekspor dalam mendukung perananan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perdagangan Regional, maka dalam sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Nilai Ekspor Nonmigas Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Nilai Ekspor non migas (US $) Tahun 2024 - 2025

No	Bulan	Nilai Ekspor nonmigas (US $)	
		2024	2025
1.	Januari	6.208.514	5.944.792
2.	Februari	5.691.752	5.766.036
3.	Maret	5.477.524	5.542.434
4.	April	4.638.428	5.813.833
5.	Mei	7.486.839	7.465.282
6.	Juni	5.742.950	4.290.787
7.	Juli	5.695.416	6.078.325
8.	Agustus	6.981.089	6.372.403
9.	September	5.129.692	7.009.230
10.	Oktober	9.804.707	6.626.276
11.	November	8.911.025	6.797.755
12.	Desember	10.530.913	6.638.534
Total :		**82.298.849**	**74.345.687**

Sumber Data : BPS Provinsi NTT Tahun 2024-2025

Sehingga dari tabel di atas Persentase peningkatan nilai ekspor tahun 2025 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun n - Nilai Ekspor Tahun (n – 1)}}{\text{Nilai Ekspor Tahun (n – 1)}} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{74.345.687 - 82.298.849}{82.298.849} \times 100\% = -9,66\ \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	65	-9,66	-14,86

Berdasarkan Tabel 3.11, total nilai ekspor non migas Provinsi NTT pada tahun 2025 tercatat sebesar US$74.345.687, menurun sebesar US$7.953.162 dibandingkan tahun 2024 yang mencapai US$82.298.849, atau mengalami penurunan sekitar 9,66 persen.

Secara bulanan, nilai ekspor non migas tahun 2025 berfluktuasi dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terlihat pada semester kedua, khususnya pada bulan Oktober hingga Desember, yang sebelumnya menjadi periode dengan nilai ekspor relatif tinggi pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan pada kinerja ekspor daerah yang diduga dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar, keterbatasan kapasitas produksi, serta belum optimalnya diversifikasi produk ekspor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, serta perluasan akses pasar ekspor guna mendorong pemulihan kinerja ekspor non migas Provinsi NTT ke depan.

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Non Migas) **) Nas.: Ekspor Non Migas*	-9,66	7,66	Ekspor Non Migas Nasional: US$269.841.000.000 (2025) US$250.652.300.000 (2024) Ekspor Non Migas Provinsi NTT: US$74.345.687 (2025) US$82.298.849 (2024)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2025		Keterangan
		NTT	Nasional	
	- Nilai ekspor Non Migas (US$) **) Nas.: Ekspor Non Migas*	74.345.687	269.841.000.000	Nilai Ekpor Non Migas di Provinsi NTT tahun 2025 mencapai US$74.345.687 memberikan kontribusi sebesar **0,028%** terhadap Nilai Ekpor Non Migas Nasional yang mencapai nilai sebesar US$269.841.000.000
	- Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Non Migas terhadap total Nilai Ekspor	97,01	95,38	➢ Provinsi NTT - Ekspor Non Migas : US$74.345.687 - Total Ekspor : US$76.636.977 ➢ Nasional: - Ekspor Non Migas : US$269.841.000.000 - Total Ekspor : US$282.908.900.000

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2024-2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.13, kinerja ekspor non migas Provinsi NTT tahun 2025 menunjukkan kontraksi sebesar -9,66 persen, berbanding terbalik dengan capaian nasional yang masih tumbuh positif sebesar 7,66 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelemahan kinerja ekspor non migas di Provinsi NTT relatif lebih dalam dibandingkan tren nasional. Secara nominal, nilai ekspor non migas Provinsi NTT tahun 2025 tercatat sebesar US$74,35 juta, yang hanya berkontribusi sekitar 0,028 persen terhadap total nilai ekspor non migas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peran Provinsi NTT dalam perdagangan ekspor nasional masih sangat terbatas.

Namun demikian, dari sisi struktur ekspor daerah, kontribusi ekspor non migas terhadap total ekspor Provinsi NTT mencapai 97,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Provinsi NTT sangat bergantung pada komoditas non migas. Dengan mempertimbangkan kontraksi nilai ekspor non migas dan rendahnya kontribusi terhadap nasional, diperlukan penguatan diversifikasi produk ekspor, peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, serta perluasan akses pasar guna memperbaiki kinerja ekspor daerah dan meningkatkan daya saing Provinsi NTT di pasar nasional maupun global.

Pengembangan nilai ekspor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor pendukung, faktor penghambat, serta langkah solusi yang dapat dilakukan:

- **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi capaian nilai ekspor adalah sebagai berikut:

1. Dominasi ekspor non migas dalam struktur ekspor daerah

   Dengan kontribusi ekspor non migas mencapai lebih dari 97 persen, Provinsi NTT telah memiliki basis ekspor yang jelas pada sektor riil, khususnya komoditas pertanian, perikanan, dan produk olahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekspor daerah tidak bergantung pada migas dan memiliki ruang pengembangan yang luas melalui peningkatan nilai tambah produk lokal.

2. Ketersediaan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal

   Provinsi NTT memiliki potensi komoditas ekspor seperti hasil perikanan, rumput laut, hasil perkebunan, buah-buahan, serta produk kerajinan dan perabot rumah tangga. Ketersediaan bahan baku lokal ini menjadi modal dasar bagi pengembangan ekspor, terutama jika didukung dengan pengolahan pascapanen dan standardisasi mutu.

3. Meningkatnya peran pelaku UMKM dan IKM dalam rantai pasok ekspor

   Keberadaan UMKM dan IKM yang semakin berkembang menjadi faktor pendukung dalam penyediaan produk ekspor skala kecil hingga menengah. Pelaku usaha lokal mulai terlibat dalam produksi barang bernilai tambah, sehingga membuka peluang perluasan basis eksportir daerah.

4. Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekspor daerah

   Pemerintah daerah melalui Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi NTT telah menjalankan berbagai program fasilitasi seperti pembinaan IKM, promosi produk unggulan, serta pendampingan perizinan dan sertifikasi. Dukungan ini menjadi pengungkit awal bagi peningkatan kapasitas pelaku usaha menuju pasar ekspor.

- **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian nilai ekspor adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Nilai Ekspor Non-Migas pada 2025

   Nilai ekspor non-migas NTT turun sekitar 9,66 % dibanding tahun sebelumnya, khususnya disebabkan oleh komoditas unggulan tertentu yang mengalami penurunan volume atau harga.

2. Ketergantungan pada Beberapa Komoditas Tertentu

Struktur ekspor yang sangat dominan hanya pada beberapa komoditas membuat ekspor daerah rentan terhadap perubahan permintaan dan harga internasional.

3. Kapasitas Produksi dan Nilai Tambah yang Terbatas

   Kegiatan produksi masih berskala kecil dan kurang terintegrasi dengan proses hilirisasi, sehingga produk belum optimal memenuhi standar pasar ekspor.

4. Akses Pasar dan Logistik Belum Optimal

   Tantangan dalam akses pengiriman, biaya logistik, dan jaringan pemasaran ekspor membuat daya saing produk NTT kurang kuat di pasar global.

- **Solusi**

Berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekspor daerah, diperlukan langkah strategis dan terarah guna meningkatkan kinerja ekspor Provinsi NTT secara berkelanjutan. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Diversifikasi Produk Ekspor

   Mengembangkan produk baru dan menambah variasi komoditas ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu saja.

2. Peningkatan Nilai Tambah dan Hilirisasi

   Mendorong pengolahan produk dasar menjadi produk bernilai tinggi (mis. buah olahan, produk perikanan siap ekspor).

3. Peningkatan Standar Mutu dan Sertifikasi Ekspor

   Memperkuat standar mutu, sertifikasi dan kepatuhan pada aturan internasional agar produk NTT lebih kompetitif di pasar global.

4. Fasilitasi Akses Pasar dan Promosi Ekspor

   Meningkatkan partisipasi dalam pameran internasional, membuka kerja sama dengan *buyer* di luar negeri, serta memanfaatkan platform digital untuk perluasan pasar.

5. Penguatan Infrastruktur Logistik

   Memperbaiki akses pelabuhan, gudang ekspor, dan jaringan transportasi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekspor.

6. Pendampingan dan Pelatihan Pelaku Usaha

   Memberikan pelatihan teknis ekspor, kemasan, pemasaran, serta pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ingin masuk pasar ekspor.

3.3 PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Pasar dan Keterjangkauan Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase rata-rata kenaikan harga barang pokok per tahun	3 – 5%	8,41%	59,45%

Berdasarkan Tabel 3.14, indikator kinerja Persentase rata-rata kenaikan harga barang pokok per tahun ditetapkan dengan target pada kisaran 3–5 persen. Pada tahun pelaksanaan, realisasi tercatat sebesar 8,41 persen, yang berada di atas batas atas target yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan batas maksimal target sebesar 5 persen sebagai dasar perhitungan, diperoleh capaian kinerja sebesar 59,45 persen.

Meskipun realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan, secara umum tingkat kenaikan harga sebesar 8,41 persen masih berada dalam batas yang relatif aman dan terkendali, serta belum menunjukkan lonjakan harga yang ekstrem. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dinamika pasokan, faktor cuaca, distribusi, serta perkembangan permintaan pasar pada beberapa komoditas strategis.

Secara umum, hasil ini menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program stabilisasi harga, khususnya dalam penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah, peningkatan kelancaran distribusi, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan, sehingga ke depan rata-rata kenaikan harga dapat lebih terkendali sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian program dimaksud, dilaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**, dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor:

- Pasar Murah Bersubsidi

Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau akibat terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar. Pasar Murah Bersubsidi dilaksanakan di 8 (delapan) Kabupaten yaitu Kab. Kupang, TTS, Alor, Lembata, Ende, Manggarai, Sabu Raijua, dan Sumba Timur. Kegiatan ini melibatkan beberapa distributor yaitu Perum Bulog dan distributor-distributor local di lokasi Pasar Murah. Metode pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi ini dilakukan melalui pendataan sasaran penerima bantuan dan pendistribusian kupon bantuan (*data collecting and coupon redemption*) oleh petugas di masing-masing kelurahan, kemudian masyarakat akan mendapatkan kupon belanja bersubsidi yang dapat dibelanjakan atau ditukarkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang diinginkan senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Masing-masing Kabupaten mendapatkan bantuan sebanyak 1000 kupon paket sembako untuk 1000 KK.

Tabel 3.15 Disribusi Kupon Belanja pada Kegiatan Pasar Murah

No.	Kab/Kota	Jumlah Kupon
1	Kab Kupang	1000
2	Kab. TTS	1000
3	Kab. Alor	1000
4	Kab. Lembata	1000
5	Kab. Ende	1000
6	Kab. Manggarai	1000
7	Kab. Sabu Raijua	1000
8	Kab. Sumba Timur	1000
Total		**8000**

2. **Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**, dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

- Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kegiatan Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya penyediaan data dan informasi harga yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok di tingkat konsumen secara periodik sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengumpulan data harga secara berkala pada sejumlah pasar tradisional dan titik pemantauan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui tren pergerakan harga, tingkat fluktuasi, serta potensi gejolak harga pada komoditas strategis.

Hasil pengambilan data harga dimanfaatkan sebagai bahan koordinasi lintas perangkat daerah, serta menjadi dasar penyusunan laporan perkembangan harga, rekomendasi kebijakan, dan langkah antisipatif guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat serta menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di daerah.

Berikut hasil pemantauan harga pada 3 (tiga) pasar tradisional di Kota Kupang yaitu Pasar Naikoten, Oebobo, Oeba:

Tabel 3.16 Rekapitulasi Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kota Kupang Tahun 2025

NO.	KOMODITAS	SATUAN	Bulan												Rata-rata
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Bapok Hasil Pertanian															
1	Beras														
	Medium														
	Beras Sulawesi	Rp/kg	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.942	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.912
	Beras Membramo	Rp/kg	13.694	13.667	13.667	13.528	13.706	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.855
	Premium														
	Beras Lonceng	Rp/kg	16.167	16.167	16.167	16.167	16.167	16.167	16.710	17.000	17.000	17.000	17.000	16.656	16.531
	Beras Nona Kupang	Rp/kg	16.000	16.000	15.579	15.000	15.412	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.833
	Beras SPHP	Rp/kg	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.967
2	Cabai														
	Cabai Merah Keriting	Rp/kg	70.278	56.667	53.421	55.000	55.000	47.222	45.870	46.000	48.333	34.348	30.750	38.750	48.470
	Cabai Merah Besar	Rp/kg	67.963	60.000	45.965	55.000	57.059	53.889	43.913	50.000	50.000	34.348	30.000	30.000	48.178
	Cabai Rawit Merah	Rp/kg	54.907	63.333	62.632	93.333	87.647	70.000	85.217	65.000	50.000	34.348	30.000	30.000	60.535
3	Bawang Merah	Rp/kg	29.889	35.000	39.123	40.000	48.333	41.019	37.174	38.000	33.571	30.000	33.500	37.500	36.926
Bapok Hasil Industri															
4	Gula Pasir														
	Curah	Rp/kg	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	9.565	18.000	18.476	18.348	18.000	18.000	17.866
	Dikemas Premium	Rp/kg	20.222	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.714	20.507	20.000	20.000	20.120
5	Minyak Goreng														
	Premium (Bimoli)	Rp/L	23.093	23.000	23.000	23.000	23.490	24.130	24.000	23.800	24.000	24.000	23.150	22.313	23.415
	Minyakita	Rp/L	18.000	17.333	17.754	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.924
6	Tepung Terigu	Rp/kg	13.204	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167	12.906	12.875	13.476	13.500	13.500	13.500	13.233
Bapok Hasil Peternakan dan Perikanan															
7	Daging Ayam Ras	Rp/kg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Telur Ayam Ras	Rp/kg	33.183	32.000	32.000	32.000	30.706	30.000	31.565	32.700	32.310	32.685	33.948	33.531	32.219
9	Daging Sapi														
	Paha Belakang	Rp/kg	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	108.750	106.190	110.000	110.000	110.000	109.578
	Tetelan	Rp/kg	85.833	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	82.174	80.000	80.000	87.334
10	Ikan Segar														
	Kembung	Rp/kg	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Tongkol/Tuna/ Cakalang	Rp/kg	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	41.850	40.500	40.500	40.500	40.500	43.238

NO.	KOMODITAS	SATUAN	Bulan												Rata-rata
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Bapok Lainnya															
11	Ikan Teri Asin	Rp/kg	93.333	93.333	93.333	88.472	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	84.873
12	Udang Segar	Rp/kg	100.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	96.667
13	Tempe Kedelai	Rp/kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Bawang Putih	Rp/kg	50.000	50.000	50.000	50.000	47.941	45.000	45.000	43.750	44.048	41.739	40.000	40.000	45.623
16	Bawang Bombay	Rp/kg	49.074	40.000	48.947	50.000	50.000	50.000	43.333	40.000	40.000	40.435	45.000	45.000	45.149
17	Tomat	Rp/kg	29.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.188
18	Ketimun	Rp/kg	14.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.954
29	Sawi Hijau	Rp/ikat	10.000	12.500	12.500	11.625	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.219
20	Kangkung	Rp/ikat	9.167	12.500	12.500	11.625	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.149
21	Kacang Panjang	Rp/ikat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Kentang	Rp/kg	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23	Pisang lokal	Rp/kg	14.333	14.333	14.333	14.333	15.569	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.408
24	Jagung Pipilan	Rp/kg	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
25	Mie Instan Kari	Rp/bks	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	Garam Halus	Rp/kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
28	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	49.347	52.000	51.395	51.375	51.000	51.000	51.457	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.256
29	Ketela Pohon	Rp/kg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.797	14.900
30	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ekor	112.963	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	107.826	100.000	100.000	100.000	99.750	95.000	105.462
31	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	67.333	67.333	67.333	67.333	67.333	67.333	67.333	67.333	67.333	67.333	59.942	54.000	65.606
32	Kacang-kacangan														
	Kacang Hijau	Rp/kg	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333
	KacangTanah	Rp/kg	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	28.188	25.000	25.000	30.266

Keterangan Indikator Warna pada tabel menunjukan adanya perubahan harga Naik Turun

Tabel 3.17 Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Harga (Rp)			Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
			Tahun 2024	Tahun 2025	Selisih (Tahun n - (n – 1))	
Bapok Hasil Pertanian						
1	Beras					
	Medium					
	Beras Sulawesi	Rp/kg	14.359	13.912	(-) 447	-3,11%
	Beras Membramo	Rp/kg	14.623	13.855	(-) 768	-5,25%
	Premium					
	Beras Lonceng	Rp/kg	16.851	16.531	(-) 320	-1,90%
	Beras Nona Kupang	Rp/kg	16.550	15.833	(-) 717	-4,33%
	Beras SPHP	Rp/kg	11.989	12.967	(+) 978	8,16%
2	Cabai					
	Cabai Merah Keriting	Rp/kg	50.483	48.470	(-) 2.013	-3,99%
	Cabai Merah Besar	Rp/kg	49.545	48.178	(-) 1.367	-2,76%
	Cabai Rawit Merah	Rp/kg	54.294	60.535	(+) 6.241	11,49%
3	Bawang Merah	Rp/kg	29.757	36.926	(+) 7.169	24,09%
Bapok Hasil Industri						
4	Gula Pasir					
	Curah	Rp/kg	18.292	17.866	(-) 427	-2,33%
	Dikemas Premium	Rp/kg	20.085	20.120	(+) 36	0,18%
5	Minyak Goreng					
	Premium (Bimoli)	Rp/L	23.833	23.415	(-) 419	-1,76%
	Minyakita	Rp/L	16.784	17.924	(+) 1.140	6,79%
6	Tepung Terigu	Rp/kg	12.264	13.233	(+) 969	7,90%
Bapok Hasil Peternakan dan Perikanan						
7	Daging Ayam Ras	Rp/kg	48.920	50.000	(+) 1.080	2,21%
8	Telur Ayam Ras	Rp/kg	37.247	32.219	(-) 5.028	-13,50%
9	Daging Sapi					
	Paha Belakang	Rp/kg	10.9167	109.578	(+) 412	0,38%
	Tetelan	Rp/kg	81.004	87.334	(+) 6.330	7,81%
10	Ikan Segar					
	Kembung	Rp/kg	47.778	45.000	(-) 2.778	-5,81%
	Tongkol/Tuna/ Cakalang	Rp/kg	48.815	43.238	(-) 5.578	-11,43%
Bapok Lainnya						
11	Ikan Teri Asin	Rp/kg	90.556	84.873	(-) 5.683	-6,28%

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Harga (Rp)			Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
			Tahun 2024	Tahun 2025	Selisih (Tahun n - (n – 1))	
12	Udang Segar	Rp/kg	92.222	96.667	(+) 4.444	4,82%
13	Tempe Kedelai	Rp/kg	10.691	10.000	(-) 691	-6,46%
14	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	10.000	10.000	0,00	0,00%
15	Bawang Putih	Rp/kg	48.788	45.623	(-) 3.165	-6,49%
16	Bawang Bombay	Rp/kg	45.205	45.149	(-) 56	-0,12%
17	Tomat	Rp/kg	19.684	16.188	(-) 3.496	-17,76%
18	Ketimun	Rp/kg	9.479	14.954	(+) 5.475	57,75%
29	Sawi Hijau	Rp/ikat	5.000	11.219	(+) 6.219	124,38%
20	Kangkung	Rp/ikat	5.000	11.149	(+) 6.149	122,99%
21	Kacang Panjang	Rp/ikat	5.000	5.000	0,00	0,00%
22	Kentang	Rp/kg	27.182	27.500	(+) 318	1,17%
23	Pisang lokal	Rp/kg	12.091	15.408	(+) 3.318	27,44%
24	Jagung Pipilan	Rp/kg	7.916	7.333	(-) 583	-7,36%
25	Mie Instan Kari	Rp/bks	3.167	3.500	(+) 333	10,53%
26	Garam Halus	Rp/kg	11.111	10.000	(-) 1.111	-10,00%
27	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	13.250	12.833	(-) 417	-3,14%
28	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	42.500	51.256	(+) 8.756	20,60%
29	Ketela Pohon	Rp/kg	11.319	14.900	(+) 3.580	31,63%
30	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ekor	78.168	105.462	(+) 27.294	34,92%
31	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	79.778	65.606	(-) 14.172	-17,76%
32	Kacang-kacangan					
	Kacang Hijau	Rp/kg	31.250	28.333	(-) 2.917	-9,33%
	KacangTanah	Rp/kg	31.045	30.266	(-) 780	-2,51%
Persentase Rata-rata Kenaikan/Penurunan Harga						**8,41%**

Keterangan :

- *Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis bahan pokok*
- *Tanda (-) minus menunjukan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu*
- *Tanda (+) plus menunjukan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu*

Dari data di atas bisa dilihat bahwa persentase rata-rata kenaikan harga pada bahan pokok dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar **8,41%.** Namun kenaikan harga ini bisa dikendalikan dan tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat, situasi jual-beli di pasar-pasar traditional tetap kondusif serta daya beli masyarakat tetap tinggi.

3.3.2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang/jasa untuk perlindungan konsumen	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	63%	58,36%	92,64%

Indikator kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen ditetapkan dengan target sebesar 63 persen. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 58,36 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,64 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menerapkan standar perlindungan konsumen dalam kegiatan pemasarannya, meskipun masih terdapat selisih terhadap target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh variasi tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang berlaku, khususnya pada pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Secara umum, hasil ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemberdayaan konsumen serta pengawasan barang dan jasa. Ke depan, peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta penguatan pengawasan akan terus dilakukan guna mendorong lebih banyak pelaku usaha menerapkan standar perlindungan konsumen secara konsisten.

Dalam rangka mendukung pencapaian program dimaksud, dilaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**, dengan subkegiatan sebagai berikut:
   a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:
      - Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Tahun 2025 melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melaksanakan kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di 16 (enam belas) Kab/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, TTS, TTU, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Flores Timur, Nagekeo, Ngada, Sikka, Alor, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.

Konsentrasi Pengawasan kali ini difokuskan pada pengawasan produk makanan, minuman, dan obat-obatan, termasuk pemantauan masa kedaluwarsa serta kepatuhan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk yang diperdagangkan, guna melindungi konsumen dari produk yang tidak layak edar.

Hasil yang dicapai oleh petugas saat melakukan pengawasan terhadap sarana perdagangan seperti Kios, Toko Pengecer, Toko Grosir, Ritel Modern, apotek, toko obat yang memperdagangkan produk makanan kemasan, minuman botol/sachet, obat bebas dan bebas terbatas (OTC), suplemen, jamu tradisional, dan lain-lain adalah sebagai berikut :

1. Ada pelaku usaha yang masih memperdagangkan produk-produk makanan yang pelabelan kedaluwarsa kurang tepat/tulisan kedaluwarsanya sudah terhapus serta kemasan produk yang sudah rusak, cacat dan tidak layak di konsumnsi;
2. Dilakukan pengamanan terhadap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan edukasi mengenai tata letak barang dan kebersihan tempat usaha;
3. Untuk barang dagangan yang sudah masuk tanggal kedaluwarsa, dipindahkan ketempat khusus untuk selanjutnya dimusnahkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan;
4. Pelaku usaha diberikan pembinaan berupa teguran secara lisan dan membuat pernyataan tertulis untuk selalu memperhatikan/ mengontrol kondisi keamanan setiap produk yang dijualnya;
5. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki NIB (nomor ijin berusaha) sehingga perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kewajiban sebagai pelaku usaha salah satu memiliki ijin usaha.

Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa

No.	Lokasi	Jumlah Pelaku Usaha	Sesuai Standar	Terdapat Temuan
1	Kab. TTS	7	7	0
2	Kab. Belu	10	6	4
3	Kab. TTU	10	10	0
4	Kab. Alor	7	5	2
5	Kab. Ende	10	4	6
6	Kab. Manggarai	11	5	6
7	Kab. Kupang	10	7	3
8	Kab. Malaka	10	4	6
9	Kab. Flores Timur	10	6	4
10	Kab. Sikka	13	11	2
11	Kab. Ngada	10	7	3
12	Kab. Nagekeo	10	4	6
13	Kab. Sumba Barat Daya	12	10	2
14	Kab. Manggarai Timur	10	8	2
15	Kab. Sumba Timur	20	7	13
16	Kota Kupang	121	53	48
Total :		**281**	**164**	**117**

2. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Pada tahun 2025, UPTD PSMB telah melakukan layanan kalibrasi terhadap alat-alat laboratorium pada 40 (empat puluh) Badan Usaha dengan total 133 sertifikat yang dikeluarkan. Kalibrasi alat ukur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan atau sistem dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengukuran atau pengolahan data. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan kualitas maupun keamanan dari suatu produk. Berikut data badan usaha yang telah melakukan kalibrasi pada UPTD PSMB:

Tabel 3.20 Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi

No	Nama Badan Usaha	Alamat	Jenis alat ukur
1	Ajendrem 161 Wira Sakti	Kota Kupang	Alat Ukur Tinggi Badan (2)
2	Polresta Kupang Kota	Kota Kupang	Alat Ukur Tinggi Badan (1)
3	Polres Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	Alat Ukur Tinggi Badan (1)
4	PT. Bina Indisejahtera	Timor Leste	Timbangan Jembatan Elektronik (1), AMP (1), Timbangan Elektronik 30 kg (1), Timbangan Elektronik 60 kg (1), Timbangan Elektronik 300 kg (1), Timbangan Elektronik 15 kg (2), Concrete Batching Plant (1)
5	Polres TTU	Kab. TTU	Alat Ukur Tinggi Badan (1), Timbangan Cepat (1)
6	BIDDOKKES Polda NTT	Kota Kupang	Timbangan Cepat (2), Alat Ukur Tinggi Badan (2)
7	Polres Belu	Kab. Belu	Timbangan Cepat (1), Alat Ukur Tinggi Badan (1)
8	Polres Nagekeo	Kab. Nagekeo	Alat Ukur Tinggi Badan (1)
9	Perum Bulog Kanwil NTT	Kota Kupang	MKA (Rice Moisture Tester) fg512 (2), Meter Kadar Air (5)
10	Dirkrimsu Polda NTT	Kota Kupang	Gelas ukur (1)
11	Sotis Hotel Kupang	Kota Kupang	Timbangan Elektronik (1)
12	CV. Perdana Karya Makmur	Kota Kupang	Gelas Ukur 100 mL (1), Gelas Ukur 250 mL (2)
13	UB. Jastasma Kanwil NTT	Kota Kupang	MKA (Rice Moisture Tester) 45465 (2), MKA (Grain MoistureAnalyser) (5), MKA (Rice Moisture Tester) (1)
14	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	Kab. Alor	Proving Ring (3), Timbangan Elektronik (1)
15	PT. Karya Baru Kalista	Kab. Alor	Timbangan Elektronik (2), Proving Ring (2), Alat Uji Tekan Beton (1)
16	SPBU 54.851.34	Kab. Kupang	Tangki Pendam (4)
17	Apotik Guardian	Kota Kupang	Anak Timbangan Kuningan (2), Timbangan Neraca (1)
18	PT. Valentine Group	Kab. Kupang	Tongkat Duga (1)
19	Pertamina Parta Niaga	Kab. Belu	Bejana Ukur (2)
20	Badan Pusat Statistik Prov. NTT	Kota Kupang	Meter Kadar Air (22)
21	PT. Ramayana Cipta Perkasa	Kab. TTU	Timbangan AMP (4),

No	Nama Badan Usaha	Alamat	Jenis alat ukur
			Timbangan 6000 gr (1), Timbangan 6100 gr (1), Timbangan 10000 gr (1), Timbangan 30000 gr (1), Proving Ring (2)
22	Dinas PUPR	Kab. TTU	Proving Ring (1), Anak Timbangan (1), Timbangan Elektronik (2)
23	CV. Esa Nita Nailain	Kab. Rote Ndao	Timbangan Digital (1), Timbangan Elektronik (1)
24	PT. Sinar Asia Jaya	Kota Kupang	Timbangan Kasar (1)
25	Kios Triv Mart	Kab. Rote Ndao	Timbangan Digital (1)
26	SPBT 99-00.282 Denbekang	Kota Kupang	Tangki Ukur Tetap Lilinder Datar (Tangki Pertalite) (1), Tangki Ukur Tetap Lilinder Datar (Tangki Solar) (1)
27	PT. Indo Raya Jaya Perkasa	Kab. Ngada	Proving Ring (2)
28	PT. Nunu Rada Bata	Kab. Ngada	Timbangan AMP (1)
29	PT. Cahaya Berlian Sukses Abadi	Kab. Kupang	Bejana Ukur (1)
30	Hotel Neo Eltari Kupang	Kota Kupang	Timbangan Elektronik (1)
31	PT. Novita Karya Taga	Kab. Ende	Proving Ring (1)
21	PT. Yetty Dharmawan	Kab. Ende	Timbangan Elektronik (3)
33	Holbala	Kab. Kupang	Timbangan Elektronik (1)
34	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	Kab. Kupang	Timbangan AMP (1), Timbangan Elektronik (3), Proving Ring (4), Force Gauge (2)
35	Polres Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	Alat Ukur Tinggi Orang (1)
36	Polres Kupang	Kab. Kupang	Alat Ukur Tinggi Orang (1)
37	Kimia Farma Hatta	Kota Kupang	Timbangan Neraca (1), Anak Timbangan (1)
38	PT. Nusa Mina Gas	Kota Kupang	Anak Timbangan (bidur 5 kg) (1), Anak Timbangan (bidur 10 kg) (1)
39	PT. Perdana Karya	Kab. Belu	Proving Ring (2)
40	PT. Dian Nusa Lestari	Kab. Belu	Proving Ring (2)
Total Sertifikat Kalibrasi :			**133**

b. Pengembangan Layanan Pengujian

Pada tahun 2025, UPTD PSMB melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan UPTD PSMB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur UPTD PSMB memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur kerja, standar operasional pelayanan, serta penerapan sistem mutu, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat.

- Pendidikan dan Pelatihan Kalibrasi Timbangan Elektronik

  Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 November 2025 di Kantor Balai Pelatihan aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM), dengan narasumber yang berasal dari Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan memastikan peserta diklat memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam melakukan kalibrasi timbangan elektronik yaitu:

  - ✓ Mampu menerapkan prosedur kerja kalibrasi timbangan elektronik dalam pekerjaan sehari-hari;
  - ✓ Mampu menentukan sumber-sumber ketidakpastian dalam kalibrasi timbangan elektronik serta menganalisa hasil kalibrasi.

  Peserta Diklat Teknis berjumlah 6 (enam) orang yang merupakan pegawai UPTD PSMB, dan seluruhnya dinyatakan telah menyelesaikan kegiatan pelatihan dengan hasil Baik.

- Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017

  Pelatihan ini dimaksudkan agar seluruh peserta dapat memahami akan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 pada laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB). Tujuan penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini adalah:

  1) Peserta memahami persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan interpretasinya;

2) Peserta memahami prinsip dokumentasi mutu laboratorium yang memenuhi kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorim kalibrasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017;
3) Peserta mampu menyusun dokumen mutu laboratorium, prosedur kerja dokumentasi serta rekaman teknis berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017;
4) Peserta mempunyai kesamaan visi dan pola pikir dalam mewujudkan akreditasi laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi di UPTD PSMB.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kupang, pada tanggal 25 s.d. 27 November 2025. Peserta pelatihan berjumah 25 orang yang merupakan pegawai pada UPTD PSMB. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara offline menggunakan metode pelatihan tatap muka yang dipandu langsung oleh instruktur atau narasumber dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

3.3.3 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Pasar, Keterjangkauan Bahan Pokok dan Barang Penting serta Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Nilai transaksi produk yang dipasarkan	80%	96,11%	100%

Berdasarkan Tabel 3.21, indikator kinerja Persentase nilai transaksi produk yang dipasarkan ditetapkan dengan target sebesar 80 persen. Pada tahun pelaksanaan, realisasi yang dicapai sebesar 96,11 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Secara umum, capaian ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, yang didukung oleh kegiatan promosi, fasilitasi pemasaran, serta penguatan jejaring distribusi. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing produk lokal.

Dalam rangka mendukung pencapaian program dimaksud, dilaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**, dengan didukung oleh subkegiatan sebagai berikut:
   a. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi:
      - Pelatihan Digitalisasi Pemasaran

        Tujuan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran ini adalah agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya dengan lebih mudah, serta menggunakan konten dan video yang menarik di berbagai platform media sosial dalam mempromosikan dan memasarkan produk pelaku usaha, sehingga menarik lebih banyak orang untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut.

        Kegiatan Pelatihan Pemasaran Online (Digitalisasi Pemasaran) dilaksanakan pada tanggal 22–23 Mei 2025 bertempat di Hotel T-more, Kota Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) pelaku usaha yang mendapatkan penyampaian teori pemahaman dasar oleh instruktur terkait konsep pemasaran digital.

        Selanjutnya, peserta diberikan pelatihan praktik yang meliputi pembuatan akun jejaring sosial, penerapan teknik pemasaran digital, serta pengeditan foto dan video produk untuk keperluan promosi. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha mampu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam memasarkan produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

3.3.4 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pertumbuhan industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan	1,75%	10,75%	100%

Berdasarkan Tabel 3.22, indikator kinerja Persentase pertumbuhan industri pengolahan ditetapkan dengan target sebesar 1,75 persen. Pada tahun pelaksanaan, realisasi yang dicapai sebesar 10,75 persen, sehingga capaian kinerja tercatat 100 persen. Realisasi yang jauh melampaui target ini menunjukkan adanya peningkatan

aktivitas pada sektor industri pengolahan, yang mencerminkan membaiknya kinerja industri di daerah.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri pengolahan. Kondisi ini didukung oleh meningkatnya investasi, aktivitas produksi, serta penguatan pembinaan terhadap pelaku industri. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan melalui penguatan perencanaan industri, fasilitasi pengembangan IKM, serta peningkatan daya saing produk daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian program dimaksud, dilaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**, dengan didukung oleh subkegiatan sebagai berikut:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri:
      - Pelatihan Pengolahan Produk dan Pendaftaran Merek

        Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 20 – 21 Mei 2025, bertempat di Aula Dekranasda Provinsi NTT di Kota Kupang. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memerikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IKM dalam melakukan pengolahan produk berbahan dasar kelor dan sorgum, serta memberikan fasilitasi sertifikasi HKI Merek kepada pelaku usaha. Peserta kegiatan berjumlah 40 (empat puluh) orang yang merupakan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) olahan pangan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
      - Kampanye Gerakan Beli NTT

        Pelaksanaan kegiatan Kampanye Gerakan Beli NTT ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk lebih memilih dan menggunakan produk lokal, serta memperkuat ekosistem usaha daerah agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui gerakan ini, diharapkan terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih berpihak pada produk daerah sendiri sehingga perputaran ekonomi dapat berlangsung secara optimal di lingkungan lokal.

        Kegiatan Kampanye Gerakan Beli NTT ini dilaksanakan menggunakan beberapa metode diantaranya:

1) Talkshow/Dialog, dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Oktober 2025 yang bertempat di RRI Kupang;
2) Pemasangan Iklan, dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada hari Senin, 27 Oktober 2025 s.d. Kamis, 27 November 2025. Tahap kedua pada hari Jumat, 19 Desember s.d. Minggu, 04 Januari 2026. Bertempat di RRI Kupang;
3) Pemasangan Spanduk, Standing Banner, dan Brosur. Spanduk dipasang di titik stategis pada papan reklame Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT di Jl. W.J. Lalamentik, standing banner dipasang di ruang tunggu Bandara Eltari Kupang, Pelabuhan Tenau Kupang, Lobi Kantor Gubernur NTT, Lobi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT NTT Mart Kota Kupang, Dapur Flobamorat, NTT Mart Kabupaten Kupang, NTT Mart Kabupaten Ende. Untuk brosur menggunakan dua versi yaitu menggunakan Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dan disimpan pada Bandara Eltari Kupang dan NTT Mart Kota Kupang;
4) Pelatihan Manajemen Usaha dan Literasi Keuangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025, bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi NTT melibatkan 100 orang peserta yang merupakan pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kota Kupang.

- Gerai Gerakan Beli NTT

Kegiatan Pembentukan Gerai Gerakan Beli NTT dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, khususnya produk lokal Provinsi NTT. Kegiatan ini bertujuan menyediakan sarana promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha guna meningkatkan akses pasar, memperkuat daya saing produk, serta mendorong peningkatan transaksi produk lokal.

Gerai Gerakan Beli NTT difasilitasi oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT dan telah dibuka serta beroperasi di 3 (tiga) lokasi strategis, yaitu di Kantor Gubernur NTT (Gedung Sasando), Bandara El Tari Kupang, dan Pelabuhan Tenau. Keberadaan gerai tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan wisatawan secara lebih luas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

- Fasilitasi Indikasi Geografis

Kegiatan Fasilitasi HKI Indikasi Geografis di Kabupaten TTS dilaksanakan pada tanggal 04 September 2025 bertempat di Sentra IKM – Kota So'e. Peserta yang hadir berjumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari anggota Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan dan penguatan Indikasi Geografis Tenun Timor Tengah Selatan telah berjalan dengan baik, ditandai dengan tersusunnya Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis serta telah didaftarkannya pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dimaksud pada Kementerian Hukum wilayah NTT. Pendaftaran ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian dan kekhasan produk, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing tenun daerah.

Selain itu, dukungan terhadap keberlanjutan produksi juga diwujudkan melalui penyaluran bantuan benang kepada penenun anggota MPIG Tenun TTS yang diserahkan secara resmi dan disaksikan oleh perangkat daerah terkait, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan kesejahteraan para penenun.

- Temu Bisnis

Pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis ini dimaksudkan untuk dapat membangun kerjasama antar pelaku IKM dan *buyer* (perhotelan, supermarket, *e-commerce*, dan sebagainya). Tujuan dilaksanakannya kegiatan Temu Bisnis ini adalah sebagai berikut:

1) Memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku IKM dan Mitra Bisnis Potensial;
2) Membuka peluang kerja sama antar pelaku usaha;
3) Memberikan akses informasi terkait pemodalan, regulai, dan peluang investasi pasar produk lokal di tingkat nasional dan internasional;
4) Mendorong terciptanya kerja sama bisnis yang berkelanjutan;
5) Meningkatkan pemahaman pelaku IKM mengenai strategi pemasaran dan manajemen bisnis.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 07 November 2025 bertempat di Aula Dekranasda Provinsi NTT, Kota Kupang. Peserta yang

mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 (tida puluh) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) Pelaku IKM, 5 (lima) perwakilan Hotel dan 5 (lima) perwakilan Supermarket di Kota Kupang. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Ari Riyanto (Manager Hotel Amaris Kupang), Bapak Faried Desoiyanto (Buyer Product Fresh dan Food Service Hypermart Wilayah Kupang), Mercy Siubelan (KADIN Provinsi NTT). Dalam kesempatan ini pelaku usaha juga diberikan ruang untuk melakukan presentasi produk usaha mereka. Diharapkan setelah kegiatan dapat terbangun hubungan kerja sama antara pelaku usaha dengan calon mitra (Hotel dan Supermarket).

- Fasilitas Sertifikasi HKI Merek

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek ini dimaksudkan untuk dapat mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk lokal, pelaku IKM memperoleh perlindungan hukum, kenyamanan dalam berusaha, serta kepastian atas kepemilikan identitas produk. Selain itu, merek yang telah terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang pemasaran baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek di Kabupaten Ende, dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Aula Hotel Fanny, Jalan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende.
2) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek di Kabupaten Manggarai Barat, dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Aula Hotel Exotic Komodo, Jln. Yohanes Sehadeun, Labuan Bajo.
3) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek di Kabupaten Sumba Timur, dilaksanakan pada Kamis, 27 November 2025, bertempat di Aula Jemmy Hotel, Jl. Umbu Marahongu, Matawai, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Peserta yang mengikuti kegiatan Fasilitasi Sertifikasi HKI Merek berjumlah 60 (enam puluh) orang dari masing-masing Kabupaten berjumlah 20 (dua puluh) orang yang merupakan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri:

- Fasilitasi Sertifikat Halal

  Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendampingi dan memfasilitasi pengurusan sertifikat Halal bagi industri pangan lokal. Penerima manfaat dari kegiatan ini berjumlah 46 (empat puluh enam) industri pangan lokal di Kabupaten Nagekeo, TTS, TTU, Ende dan Kabupaten Kupang. Kegiatan persiapan, penggajuan dan pemantauan proses sertifikat dilakukan melalui aplikasi Si Halal, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama bulan Juni s/d Desember 2025, sedangkan pelaksanaan audit atau pemeriksaan produk dilaksanakan di lokasi produksi masing-masing industri pangan lokal dengan didampingi oleh Auditor Halal. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya 20 (dua puluh) sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, masih terdapat sejumlah permohonan sertifikasi halal yang saat ini berada dalam tahap proses verifikasi dan penyelesaian administrasi.

- Rapat Koordinasi Program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Produk Dalam Negeri (P3DN)

  Kegiatan Rapat Koordinasi P3DN dilaksanakan pada 23 Oktober 2025 dan 16 Desember 2025 bertempat pada Aula Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memantau perkembangan P3DN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, mengevaluasi pelaksanaannya pada masing-masing OPD, serta membahas pembentukan Tim P3DN Provinsi NTT guna memperkuat koordinasi dan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

  1) TKDN berdasarkan data SIRUP sebesar 49,31%, dengan realisasi sampai akhir Oktober 2025 mencapai 43,66%;
  2) Masih terdapat kendala karena belum seluruh belanja barang dan jasa dilakukan melalui LPSE sehingga pencatatan TKDN belum optimal;
  3) Diperlukan penguatan implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang P3DN di Provinsi NTT;

4) Perlu peningkatan kapasitas IKM–UKM agar dapat masuk e-katalog dan toko daring (Mbiz Market) serta didorong menjadi penyedia pengadaan pemerintah;
5) Diperlukan fasilitasi sertifikasi TKDN dan SNI bagi produk unggulan daerah;
6) Perlu evaluasi dan revisi SK Tim P3DN Provinsi NTT serta penguatan perannya;
7) Diperlukan penyusunan roadmap strategi P3DN, sosialisasi berkelanjutan, dan evaluasi berkala untuk percepatan penggunaan produk dalam negeri.

- Malam IKM/UMKM

Kegiatan Malam IKM/UMKM dilaksanakan sebagai wadah promosi dan apresiasi terhadap produk-produk unggulan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk lokal, memperluas akses pasar, serta mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha melalui penyediaan ruang interaksi antara pelaku IKM/UMKM dengan masyarakat, pembeli potensial, serta pemangku kepentingan terkait.

Melalui kegiatan ini, pelaku IKM/UMKM diberikan kesempatan untuk menampilkan dan memasarkan produknya secara langsung, sekaligus memperkenalkan kualitas dan keunikan produk daerah kepada masyarakat luas. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai transaksi produk lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang dengan menghadirkan dan memfasilitasi masing-masing 50 IKM (Industri Kecil Menengah) dan 50 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada setiap kegiatan, dengan total peserta 200 IKM/UMKM. Malam IKM/UMKM I dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2025 dan Malam IKM/UMKM II pada tanggal 28-29 November 2025. Hasil dari kegiatan ini adalah:

1) Terfasilitasinya promosi dan penjualan hasil 200 pelaku usaha IKM/UMKM;
2) Jumlah transaksi/omzet di lokasi sebesar masing-masing Rp. 91.736.200 untuk kegiatan Tahap I dan Rp. 92.592.485 untuk kegiatan Tahap II;

3) Total produk yang terjual sebanyak 11.801 pcs dari 4 jenis produk lokal NTT yang ditampilkan yaitu produk pangan, kriya, fashion tenun dan kuliner.

- Festival IKM/UMKM

Kegiatan Festival IKM/UMKM dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah. Melalui pelaksanaan festival ini, pelaku IKM/UMKM diberikan kesempatan untuk menampilkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat luas, sekaligus memperkenalkan kualitas dan keunikan produk lokal. Kegiatan ini mendorong terjadinya transaksi penjualan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta memperkuat eksistensi produk lokal di pasar.

Festival IKM/UMKM dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu :

- Kabupaten Alor, tanggal 17 – 19 September 2025
- Kabupaten Ende, tanggal 16 – 18 Oktober 2025
- Kabupaten TTU, tanggal 28 Oktober – 02 November 2025

Masing-masing lokasi memfasilitasi 30 (tiga puluh) Pelaku IKM/UMKM sehingga total keseluruhan peserta sebanyak 90 (sembilan puluh) Pelaku Usaha yang memasarkan produknya. Jenis Produk yang dipromosikan terdiri dari Produk Kriya (kerajinan), Produk Kreatif, Produk Fashion (kain dan sejenisnya termasuk tenun) dan Produk Pangan olahan (kuliner). Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah:

1) Terjadinya transaski penjualan produk IKM baik secara tunai maupun non tunai dengan berbagai konsumen baru dan jaringan bisnis yang lebih besar;
2) Adanya peningkatan penjualan dan pendapatan pelaku IKM;
3) Produk IKM lokal semakin dikenal dan diminati masyarakat.

- NTT MART

Ketiadaan sarana promosi dan pemasaran serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi kendala terbesar yang menghambat promosi dan pemasaran produk IKM lokal. Padahal, produk yang dihasilkan oleh IKM lokal memiliki kekhasan dan kualitas yang mampu bersaing dengan produk dari daerah lainnya. Tersedianya sarana promosi dan pemasaran yang menampung produk IKM lokal dapat

meningkatkan pendapatan IKM serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan IKM lokal.

Melihat permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk berperan dalam menjamin ketersediaan sarana promosi dan pemasaran bagi IKM lokal melalui Pembentukan NTT Mart.

Pembentukan NTT Mart ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana promosi dan pemasaran bagi produk IKM lokal agar mampu meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Memfasilitasi seluruh IKM lokal NTT dalam mempromosikan dan memasarkan produknya;
2) Meningkatkan informasi dan minat masyarakat akan penggunaan produk lokal;
3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan pelaku IKM lokal yang dapat menyerap lapangan kerja baru;
4) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta mendorong peningkatan pendapatan IKM lokal.

NTT Mart telah diresmikan dan beroperasi di 11 Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rincian Pembentuk NTT Mart di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Waktu Pelaksanaan			Kerja Sama
		Persiapan	Launching	Operasional	
1	Kota Kupang	Bulan Juli s/d 12 Agustus 2025	12 Agustus 2025	12 Agustus s/d 31 Desember 2025	
2	Kab. Kupang	Oktober s/d 27 November 2025	27 November 2025	27 November s/d 31 Desember 2025	Gereja Ebenhaezer Jemaat Tarus Barat
3	TTS	Oktober s/d 2 November 2025	2 November 2025	2 November s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. TTS
4	Belu	Oktober s/d 1 November 2025	1 November 2025	1 November s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Belu
5	Sikka	Oktober s/d 14 Desember 2025	14 Desember 2025	14 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Sikka
6	Ende	Oktober s/d 14 Desember 2025	14 Desember 2025	14 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Ende
7	Manggarai Timur	Oktober s/d 22 Desember 2025	22 Desember 2025	22 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Manggarai Timur

No	Kabupaten	Waktu Pelaksanaan			Kerja Sama
		Persiapan	Launching	Operasional	
8	Manggarai Barat	Oktober s/d 21 Desember 2025	21 Desember 2025	21 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Manggarai Barat
9	Sumba Barat Daya	Oktober s/d 17 Desember 2025	17 Desember 2025	17 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Sumba Barat Daya
10	Sumba Barat	Oktober s/d 16 Desember 2025	16 Desember 2025	16 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Sumba Barat
11	Rote Ndao	Oktober s/d 18 Desember 2025	18 Desember 2025	18 s/d 31 Desember 2025	Dekranasda Kab. Rote Ndao

NTT Mart yang telah beroperasi di 11 Kab/Kota telah memfasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM lokal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rincian Fasilitasi NTT Mart di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten	Jumlah IKM	Jumlah Jenis Produk	Jumlah Produk
1	Kota Kupang	165	731	4194
2	Kab. Kupang	46	123	1252
3	TTS	20	109	876
4	Belu	21	93	659
5	Sikka	17	60	422
6	Ende	36	153	980
7	Manggarai Timur	32	82	844
8	Manggarai Barat	33	147	732
9	Sumba Barat Daya	46	197	1441
10	Sumba Barat	32	97	1127
11	Rote Ndao	24	67	709
TOTAL		**472**	**1859**	**13236**

- Dapur Flobamorata

Salah satu bentuk kegiatan integrasi dari Gerakan Beli NTT adalah Dapur Flobamorata yang memiliki konsep sarana kuliner yang bukan hanya sekedar tempat makan tetapi juga menjadi pusat promosi pariwisata dan investasi. Dapur Flobamora menyajikan kuliner khas NTT dengan penggunaan produk lokal asli.

Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki ragam pangan lokal yang unik karena setiap daerah memiliki ciri kuliner tersendiri yang rasanya dominan gurih, asin dan sedikit pedas dengan banyak menggunakan bahan lokal alami seperti jagung, singkong, daging asap dan daun-daunan khas daerah Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah NTT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan merencanakan pembentukan Dapur Flobamorata yang berlokasi di Pantry Dekranasda Provinsi NTT, Kota Kupang yang telah diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2025.

Beberapa contoh makanan yang akan disajikan pada Dapur Flobamorata antara lain adalah: Se'i Sapi, Se'I Ikan, Jagung Bose, Rumpu-Rampe, Sambal Lu'at, Dendeng, Lawar Rumput Laut, Lawar Ikan, Ubi Rebus, Pisang Rebus dan berbagai makanan lokal khas Nusa Tenggara Timur lainnya.

Melalui Dapur Flobamorata diharapkan menjadi sarana promosi dan pemasaran produk kuliner khas NTT yang terjangkau, halal dan higienis, serta meningkatkan minat masyarakat akan produk kuliner lokal yang mendorong peningkatan pendapatan IKM lokal.

3.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja Perangkat Daerah, diperlukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan. Pembahasan faktor-faktor ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sekaligus menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

3.4.1 Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat sebagai bahan evaluasi guna mengetahui permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

a. Faktor Teknis

Tabel 3.25 Identifikasi Faktor Teknis yang menjadi penghambat kinerja

Masalah	Dampak	Solusi
Ketersediaan data sektoral belum lengkap, tidak mutakhir, dan belum terintegrasi.	Perencanaan dan penetapan indikator kinerja kurang tepat sasaran.	Penguatan pendataan secara berkala dan pengembangan sistem basis data terintegrasi.
Minimnya fasilitas produksi, peralatan bersama, dan sentra industri yang memadai.	Produktivitas dan daya saing IKM rendah.	Fasilitasi pengembangan sentra IKM dan optimalisasi pemanfaatan sarana produksi bersama.
Banyak produk industri belum memenuhi standar mutu dan belum tersertifikasi.	Akses pasar terbatas dan daya saing produk rendah.	Fasilitasi penerapan standar industri dan pendampingan sertifikasi produk.
Data harga, stok, distribusi barang, dan pelaku usaha belum lengkap dan belum terbarui secara berkala.	Perumusan kebijakan perdagangan dan pengendalian harga kurang tepat sasaran.	Penguatan sistem pendataan perdagangan dan pemutakhiran data secara rutin.
Rantai distribusi panjang dan biaya logistik tinggi.	Harga barang di tingkat konsumen menjadi tinggi dan daya beli menurun.	Penguatan jejaring distribusi, pemangkasan rantai pasok, dan pengembangan pusat distribusi.
Keterbatasan alat dan sistem pengawasan harga, takaran, dan mutu barang.	Potensi pelanggaran perdagangan dan ketidakstabilan pasar.	Penguatan sistem monitoring perdagangan dan peningkatan kapasitas pengawasan.

b. Faktor Regulasi

Tabel 3.26 Identifikasi Faktor Regulasi yang menjadi penghambat kinerja

Masalah	Dampak	Solusi
Kebijakan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik IKM.	Program pembinaan dan pengembangan IKM kurang efektif.	Penyusunan regulasi daerah yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan pelaku industri.
Prosedur perizinan usaha industri masih dianggap rumit dan berlapis.	Minat investasi dan pengembangan industri menjadi terhambat.	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan layanan perizinan terpadu.
Terdapat perbedaan ketentuan antara kebijakan pusat dan regulasi daerah terkait perdagangan dan ekspor.	Pelaksanaan fasilitasi perdagangan dan ekspor kurang optimal.	Harmonisasi regulasi melalui koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina.
Adanya kegiatan baru diperubahan anggaran	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Penyusunan kajian sebelum kegiatan dilaksanakan
Belum tersertifikasinya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Tidak memiliki legitimasi secara hukum untuk melaksanakan pelayanan	Melakukan akreditasi kelembagaan pada UPTD Pengajuan dan Sertifikasi Mutu Barang

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 3.27 Identifikasi Faktor SDM yang menjadi penghambat kinerja

Masalah	Dampak	Solusi
Keterbatasan jumlah aparatur pembina serta tenaga pendamping IKM/UMKM dan pelaku perdagangan.	Pelaksanaan program dan pengawasan tidak optimal.	Optimalisasi pembagian tugas, penguatan peran pendamping, dan kerja sama dengan pihak terkait.
Pelaku industri dan perdagangan masih terbatas pemahamannya tentang manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran.	Usaha sulit berkembang dan berkelanjutan.	Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan.
Ketidaktersediaan SDM yang tersertifikasi	Tidak dapat melaksanakan kegiatan pelayanan dengan optimal	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dan sertifikasi
Ketidaksesuai kompetensi SDM dengan pelayanan yang diberikan di UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Terjadinya kesalahan teknis dan proses pelayanan yang dilakukan menjadi lambat	Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

d. Faktor Eksternal

Tabel 3.28 Identifikasi Faktor Eksternal yang menjadi penghambat knerja

Masalah	Dampak	Solusi
Ketidakstabilan ekonomi nasional dan global mempengaruhi daya beli dan aktivitas usaha	Penurunan produksi, penjualan, dan kinerja perdagangan.	Penetapan prioritas program dan penguatan efisiensi serta diversifikasi produk.

Masalah	Dampak	Solusi
Pelaku industri dan perdagangan, khususnya IKM/UMKM, sulit mengakses pembiayaan.	Pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi terhambat.	Fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan dengan lembaga keuangan.
Masuknya produk dari luar daerah dan luar negeri dengan harga dan kualitas bersaing.	Pangsa pasar produk lokal menurun.	Peningkatan kualitas, diferensiasi produk, dan promosi produk lokal.

3.4.2 Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang berperan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi faktor pendukung ini penting untuk memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang memperkuat pencapaian kinerja, sekaligus menjadi dasar dalam mempertahankan dan mengoptimalkan praktik-praktik baik yang telah berjalan guna mendukung peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Berikut faktor-faktor yang mendukung pancapaian kinerja Tahun 2025:

a. Faktor koordinasi:
   - Koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif;
   - Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah;
   - Kemitraan dengan pelaku usaha dan asosiasi (KADIN);
   - Kerjasama lintas wilayah.

b. Faktor Inovasi:
   - Pengembangan produk industri dan perdagangan yang memanfaatkan keunggulan lokal meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
   - Pemanfaatan platform digital, e-commerce, dan promosi kreatif memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan;
   - Model kerja sama baru dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperkuat ekosistem industri dan perdagangan.

c. Faktor Komitmen:
   - Upaya berkelanjutan untuk memperbaiki layanan perindustrian dan perdagangan meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat;
   - Kesediaan untuk bekerja sama dengan pelaku usaha, asosiasi, dan mitra strategis memperkuat efektivitas program.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat alokasi target penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Target Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Alokasi		Target
1.	**APBD**			
a.	**Belanja (Program)**	**Rp.**	**32.936.485.615,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	11.090.670.776,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	2.036.370.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	660.102.892,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	30.882.900,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	19.118.459.047,-	Realisasi minimal 85 %
b.	**Pendapatan**	**Rp.**	**169.165.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	**Rp.**	**33.105.650.615,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**			
a.	**Program Dekonsentrasi**			
	1.			
b.	**Program Tugas Pembantuan**			
	1.			
	Jumlah Tugas Pembantuan			

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025

3.5.1 Anggaran bersumber dari APBD

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi anggaran dari APBD sebesar **Rp32.936.485.615,-** (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah), dengan realisasi sebesar **Rp19.769.290.263,-** (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar **60,02** persen dari anggaran yang ditetapkan. Rincian realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keu (Rp)	Keu (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.090.670.776,-	9.179.352.945,-	82,77
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.036.370.000,-	1.996.062.051,-	98,02
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	660.102.892,-	568.576.162,-	86,13
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.882.900,-	30.882.900,-	100
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.118.459.047,-	7.994.416.205,-	41,82
	Total :	**32.936.485.615,-**	**19.769.290.263,-**	**60,02**

Rincian realisasi belanja yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2025				**32.936.485.615**	**19.769.290.263**	**60,02**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**11.090.670.776**	**9.179.352.945**	**82,77**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**49.749.022**	**49.183.500**	**98,86**
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.740.922	27.726.000	99,95
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.983.600	14.593.000	97,39
		1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.024.500	6.864.500	97,72

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.681.737.940**	**7.361.367.222**	**84,79**
		2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.651.777.782	7.331.627.222	84,74
		2.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	29.960.158	29.740.000	99,27
	3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.781.000**	**20.629.000**	**99,27**
		3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.781.000	20.629.000	99,27
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**233.570.300**	**189.325.009**	**81,06**
		4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.700.600	24.197.700	97,96
		4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.057.600	12.056.150	99,99
		4.3 Penyediaan Bahan/Material	54.911.100	54.516.464	99,28
		4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.480.000	36.479.492	100
		4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.421.000	62.075.203	58,88
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.930.505.854**	**1.386.630.976**	**71,83**
		6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.048.500	8.790.500	97,15
		6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.316.274	144.476.736	99,42
		6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.776.141.080	1.233.363.740	69,44
	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154.326.660**	**152.217.238**	**98,63**
		7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.783.200	72.814.370	97,37
		7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.040.000	14.021.918	99,87
		7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.430.000	15.319.150	99,28
		7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.073.460	50.061.800	99,98
	8	**Fasilitasi Keprotokolan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**
		8.1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	20.000.000	100
II	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**2.036.370.000**	**1.996.062.051**	**98,02**
	1	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**	**2.016.366.000**	**1.976.058.051**	98,00
		1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	2.016.366.000	1.976.058.051	98,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	2	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**20.004.000**	**20.004.000**	**100**
		2.1	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi	20.004.000	20.004.000	100
III	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**660.102.892**	**568.576.162**	**86,13**
	1	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota**		**488.803.692**	**429.091.390**	**87,78**
		1.1	Pengembangan Layanan Kalibrasi	170.531.000	126.101.980	73,95
		1.2	Pengembangan Layanan Pengujian	318.272.692	302.989.410	95,20
	2	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**		**171.299.200**	**139.484.772**	**81,43**
		2.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	171.299.200	139.484.772	81,43
IV	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**30.882.900**	**30.882.900**	**100**
	1	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**		**30.882.900**	**30.882.900**	**100**
		1.1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	30.882.900	30.882.900	100
V	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**19.118.459.047**	**7.994.416.205**	**41,82**
	1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**		**19.118.459.047**	**7.994.416.205**	**41,82**
		1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	958.325.300	945.532.933	98,67
		1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	18.160.133.747	7.048.883.272	38,82

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi APBD sebesar Rp32.936.485.615 dengan realisasi sebesar Rp19.769.290.263 atau 60,02 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya terserap secara maksimal.

Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang mencapai 100 persen, diikuti Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 98,02 persen, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 82,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional perangkat daerah, stabilisasi harga, serta fasilitasi penggunaan produk dalam negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sementara itu, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terealisasi sebesar 86,13 persen, yang didukung oleh tingginya capaian kegiatan pengujian mutu produk, meskipun pengembangan layanan kalibrasi masih relatif rendah.

Adapun Program Perencanaan dan Pembangunan Industri menunjukkan realisasi terendah, yaitu 41,82 persen, terutama disebabkan rendahnya penyerapan pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri yang hanya mencapai 38,82 persen, meskipun pembangunan sumber daya industri telah terealisasi hampir optimal.

Rendahnya capaian realisasi anggaran secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh adanya penambahan anggaran pada akhir Triwulan IV yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung Program Dasa Cita, sehingga waktu pelaksanaan yang tersedia menjadi sangat terbatas dan tidak memungkinkan seluruh kegiatan diselesaikan secara optimal. Namun demikian, secara umum output kegiatan tetap tercapai, pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

3.5.2 Anggaran bersumber dari APBN

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mendapatkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, seluruh pembiayaan program dan kegiatan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT. Pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

3.5.3 Pendapatan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT diberikan target pendapatan sebesar **Rp169.165.000,-** (Seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima rupiah) yang kemudian dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp311.109.030,-** (Tiga ratus sebelas juta seratus sembilan ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebaga berikut:

Tabel 3.32
Realisasi Pendapatan Tahun 2025

No	Program		Target (Rp)	Tahun 2025	
				Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2025			**169.165.000,-**	**241.489.200,-**	**142,75**
1	**Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan**		**29.000.000,-**	**54.285.000 ,-**	**187,19**
	a.	Sewa Aula Dekranasda	10.000.000,-	10.000.000 ,-	100
	b.	Sewa Pantri Dekranasda	19.000.000,-	30.000.000,-	157,89
	c.	NTT Mart	-	14.285.000,-	-
2	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**		**140.165.000,-**	**187.032.200 ,-**	**133,44**
	a.	Sewa Rumah Dinas	36.000.000,-	32.200.000 ,-	89,44
	b.	Layanan Kalibrasi	104.165.000,-	52.414.000 ,-	50,32
	c.	Kontribusi Penjualan Garam	-	102.418.200,-	-
3	**Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah**		**-**	**172.000 ,-**	**-**

Berdasarkan Tabel 3.32, total target pendapatan Tahun 2025 sebesar **Rp169.165.000**, dengan realisasi mencapai **Rp241.489.200** atau sebesar **142,75 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan potensi pendapatan daerah pada sektor retribusi dan pemanfaatan aset.

Kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp187.032.200 atau 133,44 persen dari target. Capaian ini terutama didukung oleh adanya kontribusi penjualan garam yang sebelumnya belum dimasukan sebagai target pendapatan Tahun 2025 namun pada akhir tahun terdapat realisasi sebesar Rp102.418.200, sehingga meningkatkan total pendapatan secara signifikan. Sementara itu, pendapatan dari layanan kalibrasi terealisasi sebesar 50,32 persen, menunjukkan masih adanya ruang peningkatan optimalisasi layanan

tersebut. Untuk komponen sewa rumah dinas, realisasi mencapai 89,44 persen, relatif mendekati target yang ditetapkan.

Pada kelompok Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, realisasi tercatat sebesar 187,19 persen, terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan dari sewa pantry Dekranasda yang melampaui target, adapun pendapatan dari sewa aula Dekranasda terealisasi sesuai target, yaitu 100 persen. Dengan adanya pembentukan NTT Mart di Triwulan III sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan daerah sebesar Rp14.285.000.

Selain itu, terdapat tambahan pendapatan dari denda retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp172.000, yang bersifat insidental dan tidak menjadi target utama pendapatan.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dengan capaian melebihi target, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan retribusi serta pemanfaatan aset daerah.

3.6 EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan realisasi penggunaannya pada setiap program dan kegiatan.

Tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai sasaran dengan penggunaan anggaran yang hemat, tanpa mengurangi kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Sebaliknya, tingkat efisiensi yang rendah atau nilai realisasi yang melebihi pagu anggaran menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengendalian keuangan di periode berikutnya.

Secara umum, hasil pengukuran efisiensi anggaran digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program telah sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan akuntabel.

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menunjukkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini menggambarkan **tingkat penyerapan anggaran**.

Semakin tinggi nilai rasio (mendekati 100%), berarti penggunaan anggaran semakin optimal. Namun jika rasio melebihi 100%, berarti terjadi kelebihan realisasi (*overbudget*).

2. Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi menunjukkan persentase selisih antara anggaran dan realisasi anggaran terhadap total anggaran yang tersedia, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran - Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi digunakan untuk menilai **tingkat penghematan atau optimalisasi penggunaan anggaran.** Semakin kecil persentasenya, semakin efisien penggunaan anggaran tersebut.

Hubungan rasio efisiensi dan tingkat efisiensi dapat dilihat paa tabel berikut:

Tabel 3.33 Keterkaitan Rasio Efisiensi dan Tingkat Efisiensi Anggaran

Rasio Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori	Keterangan
≥ 90% – 100%	≤ 10%	Sangat Efisien	Realisasi anggaran sangat optimal; selisih kecil antara anggaran dan realisasi
75% – < 90%	> 10% – 25%	Efisien	Penggunaan anggaran efektif dan hemat; kegiatan terlaksana baik
60% – < 75%	> 25% – 40%	Cukup Efisien	Ada penghematan cukup besar, namun kegiatan tetap tercapai.
50% – < 60%	> 40% – 50%	Kurang Efisien	Penyerapan anggaran rendah; pelaksanaan kegiatan belum optimal
< 50%	> 50%	Belum Efisien	Anggaran sebagian besar tidak terserap; kegiatan tidak terlaksana optimal
> 100%	-	Tidak Efisien (Overbudget)	Realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan.

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja prioritas melalui pemanfaatan dana secara tepat sasaran, hemat, dan terkendali. Upaya efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan pada skala prioritas, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menekan pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah terhadap capaian program.

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

3.6.1 Efisiensi APBD Tahun 2025

Berikut tingkat efisiensi dana APBD TA. 2025:

Tabel 3.34 Efisiensi Penggunaan APBD Tahun 2025

No	Program	Pagu (Rp)	Tahun 2025				
			Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ketagori Efisiensi
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.090.670.776	9.179.352.945	1.911.317.831	82,77	17,23	Efisien
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.036.370.000	1.996.062.051	40.307.949	98,02	1,98	Sangat Efisien
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	660.102.892	568.576.162	91.526.730	86,13	13,87	Efisien
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.882.900	30.882.900	0	100	0	Sangat Efisien
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	19.118.459.047	7.994.416.205	11.124.042.842	41,82	58,18	Belum Efisien
	Total :	**32.936.485.615**	**19.769.290.263**	**13.167.195.352**	**60,02**	**39,98**	**Cukup Efisien**

Capaian efisiensi penggunaan APBD Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dilaksanakan secara efektif. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berhasil mencapai kategori sangat efisien, yang mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran serta optimal dalam pemanfaatan anggaran. Capaian ini sekaligus menunjukkan keberhasilan perangkat daerah dalam mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen berada pada kategori efisien, menandakan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dengan output yang tercapai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dukungan operasional perangkat daerah, layanan standardisasi, serta pengawasan barang beredar telah berjalan dengan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal.

Sementara itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri masih berada pada kategori belum efisien, terutama disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri. Namun demikian, secara keseluruhan capaian efisiensi Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah diarahkan pada pencapaian hasil, bukan semata-mata serapan keuangan, sehingga mayoritas program strategis tetap dapat terlaksana dan mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

Secara keseluruhan, capaian efisiensi penggunaan APBD Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT telah berorientasi pada pencapaian output dan outcome program. Meskipun masih terdapat variasi tingkat efisiensi antar program, pelaksanaan kegiatan secara umum mampu mendukung sasaran strategis perangkat daerah. Ke depan, diperlukan penguatan kualitas perencanaan, peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pengendalian anggaran guna meningkatkan efektivitas belanja dan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara alokasi sumber daya dengan pencapaian kinerja

BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan kategori **Cukup Berhasil** atau **65,71%** meski demikian, pencapaian Indikator Kinerja Utama akan terus menjadi prioritas dan perhatian untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan sub sektor Industri Pengolahan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri;
3. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan;
4. Masih relatif tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar;
5. Neraca perdagangan luar negeri daerah yang defisit diakibatkan karena nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor;
6. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah;
7. Kapasitas Sumber Daya Manusia IKM/UKM yang belum memadai;
8. Hasil produk unggulan belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

1) Ketersediaan informasi data harga pasar secara *real time* untuk seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2) Terus membangun koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal sinkronisasi program/kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja;
3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan;
4) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri;
5) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

LAMPIRAN

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Reviewer	**: Kepala Dinas**

Catatan Koreksi :

1. Koordinasikan hasil kegiatan dengan bidang terkait
2. Perhatikan perhitungan capaian kinerja sesuaikan dengan rumusan dalam perjanjian kinerja tahun 2025

Kupang, Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. Drs. Zet Libing, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680713 198903 1 009

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Reviewer : Sekretaris

Catatan Koreksi :

1. Perhatikan kembali tata bahasa dan tanda baca
2. Sesuaikan sistematikan penulisan
3. Sesuaikan kembali hasil capaian kinerja sesuai hasil koreksi biro organisasi

Kupang, Februari 2026

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

M. Christinova M. Silalahi, SE., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730405 199803 2 004

LEMBAR KOREKSI LKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Dr Nag perindag
KOREKTOR :

1. KELENGKAPAN DOKUMEN LKIP

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Daftar Isi	✓	
2.	Kata Pengantar	✓	
3.	Iktisar Eksekutif	✓	
4.	Lembar Verifikasi Level 1		✓

2. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

A. BAB I PENDAHULUAN

Apakah BAB I telah memuat tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta dasar hukum dan sistematika?
YA ☐ TIDAK ☐
Jika Tidak, sebutkan kekurangannya.....
.....
.....

B. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Apakah pada BAB II berisikan penjabaran berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahunan? ☐ YA ☐ TIDAK
Jika Tidak, sebutkan kekurangannya.....

C. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Apakah pada Bab III memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran?
  ☐ YA ☐ TIDAK
- Apakah pada Bab III menyajikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi? YA ☐ TIDAK ☐
- Apakah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
  - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Dipindai dengan CamScanner

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
- Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

☐ YA ☐ TIDAK

Jika Tidak, sebutkan kekurangannya.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. BAB IV PENUTUP

Apakah pada Bab IV diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya? YA ☐ TIDAK ☐

Jika Tidak, sebutkan kekurangannya.....

.....

E. LAMPIRAN (opsional)

Apakah LKIP memuat LAMPIRAN berupa dokumen lainnya yang dianggap perlu?

☐ YA ☐ TIDAK

CATATAN PERBAIKAN

- Lengkapi lembar koreksi level 1'
- Lengkapi hal 32'

Kupang, 11-2 2026

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. Zet Libing, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Mei 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
E. Melkiades Laka Lena	**Dr. Drs. Zet Libing, M.Si**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,4
		2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,75
2	Meningkatnya Nilai Ekspor	1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	65

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi		Target
1.	**APBD**			
a.	**Belanja (Program)**	**Rp.**	**15.371.306.730,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	12.311.801.802,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	520.004.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	515.648.968,-	Realisasi minimal 85%
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	30.882.900,-	Realisasi minimal 85%
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	1.992.969.060,-	Realisasi minimal 85%
b.	**Pendapatan**	**Rp.**	**169.165.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan	**Rp.**	**15.540.471.730,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**			
a.	**Program Dekonsentrasi**	**Rp.**	-	-
	1.			
b.	**Program Tugas Pembantuan**	**Rp.**	-	-
	1.			
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	**Rp.**	-	-

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

3. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

4. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-*upload)* melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, Mei 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Let Libing, M.Si

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

E. Melkiades Laka Lena

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. Zet Libing, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, November 2025

Pihak Kedua,

E. Melkiades Laka Lena

Pihak Pertama,

Dr. Drs. Zet Libing, M.Si

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,4
		2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,75
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor	1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	65

Dipindai dengan CamScanner

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	**APBD**		
a.	**Belanja (Program)**	**Rp. 32.936.485.615,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11.090.670.776,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 2.036.370.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 660.102.892,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 30.882.900,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 19.118.459.047,-	Realisasi minimal 85 %
b.	**Pendapatan**	**Rp. 169.165.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	**Rp. 33.105.650.615,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**		
a.	**Program Dekonsentrasi**		
	1.		
b.	**Program Tugas Pembantuan**		
	1.		
	Jumlah Tugas Pembantuan		

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

Dipindai dengan CamScanner

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-*upload)* melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, November 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Zet Libing, M.Si

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

E. Melkiades Laka Lena

PARAF HIERARKI	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer – Ahli Pertama	

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. Zet Libing, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, November 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
E. Melkiades Laka Lena	**Dr. Drs. Zet Libing, M.Si**

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,4
		2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,75
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor	1. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	65

Dipindai dengan CamScanner

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	**APBD**		
a.	**Belanja (Program)**	**Rp. 32.936.485.615,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11.090.670.776,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 2.036.370.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 660.102.892,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 30.882.900,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 19.118.459.047,-	Realisasi minimal 85 %
b.	**Pendapatan**	**Rp. 169.165.000,-**	**Realisasi minimal 90%**
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	**Rp. 33.105.650.615,-**	**Realisasi minimal 90%**
2.	**APBN**		
a.	**Program Dekonsentrasi**		
	1.		
b.	**Program Tugas Pembantuan**		
	1.		
	Jumlah Tugas Pembantuan		

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

Dipindai dengan CamScanner

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-*upload)* melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, November 2025

Gubernur Nusa Tenggara Timur,

E. Melkiades Laka Lena

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dr. Drs. Zet Libing, M.Si

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN

KEGIATAN PASAR MURAH










DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT
PASAR MURAH BERSUBSIDI
disperindag.provntt.go.id
disperindagntt
disperindagntt
disperindagntt



KEGIATAN PENGAMBILAN DATA HARGA

















KEGIATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA







KEGIATAN PELATIHAN PENGOLAHAN PRODUK DAN FASILITASI PENDAFTARAN MEREK






BERBAHAN BAKU KELOR DAN SORGUM
SERTA FASILITASI MEREK
Dancow








PELATIHAN PENGOLAHAN PRODUK
BERBAHAN BAKU KELOR DAN SORGUM
SERTA FASILITASI MEREK


MoriGe

KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI MEREK







KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL













KEGIATAN TEMU BISNIS







KEGIATAN PELATIHAN PEMESARAN *ONLINE*





KEGIATAN FASILITASI INDIKASI GEOGRAFIS





KEGIATAN GERAKAN BELI NTT







KEGIATAN DIKLAT KALIBRASI TIMBANGAN ELEKTRONIK









KEGIATAN PELATIHAN ISO/IEC 17025:2017





DAPUR FLOBAMORATA





DAPUR
FLOBAMORATA

Cita Rasa Khas NTT







NTT MART




















Selamat Datang
DI NTT MART


LAUNCHING
Ceremony



MALAM IKM/UMKM



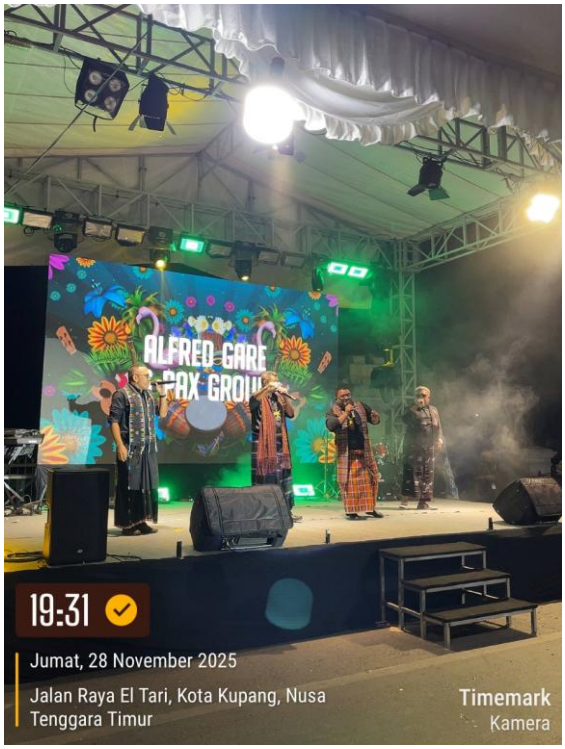









MALAM
IKM/ UMKM
19:04
Jumat, 28 November 2025
Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jl. El Tari, Oebobo, Kota Kupang, Nusa
Timemark
Kamera


19:31
Jumat, 28 November 2025
Jalan Raya El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Timemark
Kamera


20:19
Jumat, 28 November 2025
Jalan Raya El Tari No. 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Timemark
Kamera


20:22
Jumat, 28 November 2025
Jalan Raya El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Timemark
Kamera

FESTIVAL IKM/UMKM







